



KABUPATEN BREBES TAHUN 2021



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021**

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BREBES
2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Brebes Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Brebes.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Brebes tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk

penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Brebes, 22 Maret 2022



BUPATI BREBES,
IDZA PRIYANTI, SE, MH.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan.

Tahun 2021 merupakan tahun ke-4 dari RPJMD 2017 – 2022, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Brebes tersebut, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

➤ Misi I

Misi I terdapat 2 sasaran dan 3 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 95,65 % kategori sangat berhasil.

➤ Misi II

Misi II terdapat 7 sasaran dan 11 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 90,09 % kategori berhasil.

➤ Misi III

Misi III terdapat 7 sasaran dan 9 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 1442,09 % kategori sangat berhasil.

➤ Misi IV

Misi IV terdapat 5 sasaran dan 6 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 104,21 % kategori sangat berhasil.

➤ Misi V

Misi V terdapat 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 100,00 % kategori sangat berhasil.

➤ Misi VI

Misi VI terdapat 3 sasaran dan 13 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 63,51 % kategori berhasil.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana diatas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 27 Sasaran yang mencakup 45 indikator sasaran, diketahui bahwa tercapai nilai 323,93 % dengan kategori sangat berhasil.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Brebes untuk tahun anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Brebes, 21 Maret 2022

**Inspektur Daerah
Kabupaten Brebes**

Drs. Nur Ari Haris Yuswanto, M. Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19770125 199511 1 001

CHECKLIST REVIU

No.	Pernyataan		Check List
I.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	Y
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	Y
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	Y
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Y
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	-
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Y
			Y
II.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	Y
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	Y
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	Y
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi disetiap unit kerja	Y
		5. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	-
		6. Analisis / penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	-
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	-
			Y
III.	Substansi	1. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Y
		2. Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	Y
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Y
		4. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai	Y

No.	Pernyataan		Check List
		dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja	
		5. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	Y
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Y
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Y
		8. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan / sasaran	Y
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	Y
		10. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah SMART	Y

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Pernyataan Telah di Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Brebes	iii
Cek List Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Grafik	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Brebes	2
C. Susunan Organisasi Perangkat DAerah	20
D. Permasalahan Utama Kabupaten Brebes Tahun 2021	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	24
B. Perjanjian Kinerja Tahun	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	
A. Pengukuran Kinerja	35
B. Capaian Kinerja Tahun 2021	37
C. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2021	47
D. Realisasi Anggaran	120
BAB IV PENUTUP	127
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	
2. REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah per kecamatan	4
Tabel 1.2. Penduduk Kabupaten Brebes menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2021	7
Tabel 1.3. Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2021	8
Tabel 1.4. Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes	13
Tabel 1.5. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 – 2020 (Jutaan Rupiah)	16
Tabel 1.6. Persentase PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 – 2020	18
Tabel 1.7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Brebes Tahun 2021	19
Tabel 2.1. Prioritas Pembangunan Daerah	29
Tabel 2.2. Sasaran Pembangunan Daerah	30
Tabel 3.1. Pengukuran dengan Skala Ordinal	36
Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021	38
Capaian Kinerja Sasaran	38
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya ...	40
Tabel 3.4. Rata – rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021	43
Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	48
Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2021	49
Tabel 3.8. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat	51
Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2021	52
Tabel 3.10. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Jalan	69
Tabel 3.11. Capaian Kinerja Cakupan Akses Air Bersih	71
Tabel 3.12. Capaian Kinerja Meningkatnya Cakupan Sanitasi	74
Tabel 3.13. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Irigasi dalam Kondisi Baik	78
Tabel 3.14. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat	80
Tabel 3.15. Menurunnya Kawasan Lingkungan Pemukiman Kumuh	83
Tabel 3.16. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	84
Tabel 3.17. Capaian Kinerja Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian	86
Tabel 3.18. Capaian Kinerja Indikator Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan	87
Tabel 3.19. Capaian Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Perikanan	89
Tabel 3.20. Capaian Indikator Kinerja Sektor Peternakan	90
Tabel 3.21. Capaian Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Industri	91
Tabel 3.22. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan ..	92
Tabel 3.23. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	93
Tabel 3.24. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Laju Investasi Daerah Dengan Memperhatikan Ketersediaan Sumber Daya Alam, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	96

Tabel 3.25. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penguatan Sistem Inovasi Daerah	97
Tabel 3.26. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Angkatan Kerja yang Bekerja ...	99
Tabel 3.27. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	101
Tabel 3.28. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Membaiknya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	103
Tabel 3.29. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Profesional dan Berkompeten	104
Tabel 3.30. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kelitbangan	105
Tabel 3.31. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan serta kenyamanan lingkungan masyarakat	107
Tabel 3.32. Capaian Kinerja Misi Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menjadi Desa Yang Maju Dan Mandiri	109
Tabel 3.33. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan.....	112
Tabel 3.34. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara Merata	115
Tabel 3.35. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara Merata	118
Tabel 3.36. Capaian Kinerja Sasaran 6.3.....	119
Tabel 3.36. Perkembangan Pendapatan Daerah dari Tahun 2012 – 2021.....	121
Tabel 3.37. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Brebes	3
Gambar 3.1. Kegiatan Kelas Ibu Hamil	54
Gambar 3.2. Pemeriksaan Kehamilan Menjelang Persalinan	56
Gambar 3.3. Pelayanan Posyandu Untuk Batita	57
Gambar 3.4. Pelayanan Penimbangan Anak Balita	58
Gambar 3.5. Pengukuran Kebugaran dan Kesehatan Karyawan Puskesmas	60
Gambar 3.6. Kegiatan Posyandu Lansia.....	61
Gambar 3.7. Pelayanan Pengukuran Tekanan Darah Masyarakat	62
Gambar 3.8. Pelayanan Pengukuran Gula Darah.....	63
Gambar 3.9. Pemeriksaan dan Kunjungan Ke Rumah Orang Gangguan Jiwa Yang Dipasung	64
Gambar 3.10. Penyuluhan Tentang HIV/AIDS dan Tes VCT	66
Gambar 3.11. Peningkatan Jalan Jl. Kretek - Kaligua	70
Gambar 3.12. Pembangunan Tambahan Mata Air di Desa Kutayu Kec.Tonjong	73
Gambar 3.13. Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Brebes.....	76

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Penggunaan Lahan di Kabupaten Brebes	6
Grafik 1.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan.....	16
Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2021.....	16
Grafik 3.1. Cakupan K4 Di Kabupaten Brebes	54
Grafik 3.2. Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	55
Grafik 3.3. Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	57
Grafik 3.4. Perbandingan Jumlah Penderita DM Yang Dilayani Kesehatan Dengan Total Penderita DM Secara Keseluruhan.....	63
Grafik 3.5. Perbandingan Pelayanan Kesehatan ODGJ dengan Jumlah Total ODGJ Di Kabupaten Brebes	64
Grafik 3.6. Angka Keberhasilan Pengobatan TB	65
Grafik 3.7. Jumlah Kasus HIV, AIDS dan Kematian Akibat AIDS Di Kabupaten Brebes	66
Grafik 3.8. Angka Kematian Bayi	67
Grafik 3.9. Kasus Kematian Ibu	68
Grafik 3.10. Capaian Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Mantap.....	71
Grafik 3.11. Capaian Akses Air Bersih Masyarakat.....	73
Grafik 3.12. Capaian Kawasan Bebas Genangan	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. Gambaran Umum Kabupaten Brebes

1. Kondisi Geografis

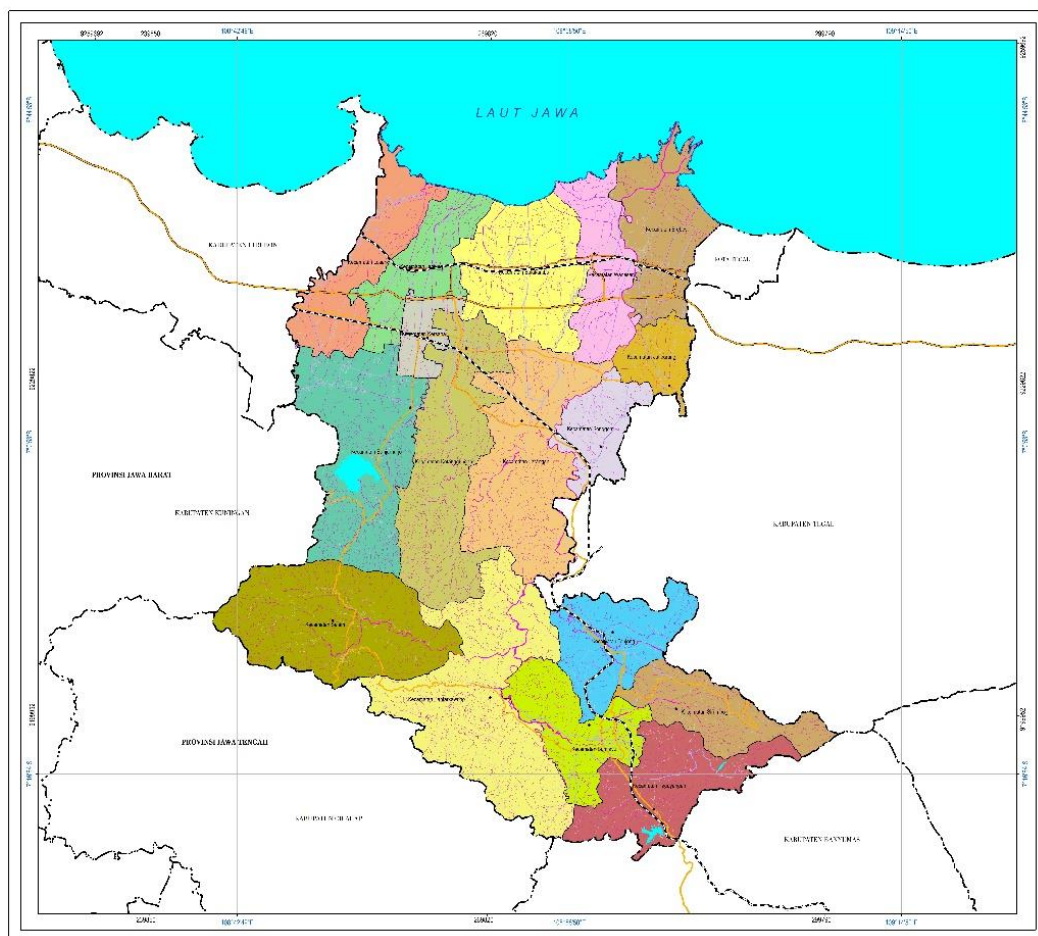
Kabupaten Brebes merupakan wilayah administrasi bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki letak strategis karena berada di wilayah barat Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Secara astronomi, Kabupaten Brebes berada di 6044'-7021' Lintang Selatan dan antara 108041'-109011' Bujur Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sejauh 87 km dan dari barat ke timur sejauh 50 km terdapat garis pantai sepanjang 55 km yang membentang dari Kecamatan Losari sampai dengan Kecamatan Brebes dan luas wilayah laut 12 mil dari darat mencapai 1.036,80 km². Luas Kabupaten Brebes tercatat 1.769,62 km².

Secara geografis Kabupaten Brebes terletak antara 6°44'-7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' - 109°11' Bujur Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sepanjang 87 km dan dari barat ke timur sepanjang 50 km.

Adapun batas administrasi Kabupaten Brebes yaitu:

Batas Wilayah	Kabupaten/ Kota	Kecamatan Yang Berbatasan
- Timur :	Kota Tegal Kabupaten Tegal	Brebes. Jatibarang, Songgom, Larangan, Tonjong.
- Selatan :	Kabupaten Banyumas Kabupaten Cilacap	Sirampog, Paguyangan. Bantarkawung, Salem.
- Utara :	Laut Jawa	Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Brebes
- Barat :	Kabupaten Cirebon Kabupaten Kuningan	Losari. Banjarharjo, Salem.

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Brebes



Secara administratif Kabupaten Brebes terdiri dari 17 kecamatan dan dibagi lagi menjadi 292 desa dan 5 kelurahan, 1.573 RW dan 8.153 RT. Jarak dari ibukota kabupaten ke kecamatan terjauh adalah Kecamatan Salem dan terdekat Kecamatan Brebes.

Beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes memiliki topografi yang sama, yaitu 5 kecamatan berupa daerah pesisir/pantai, 9 kecamatan dataran rendah dan 3 kecamatan dataran tinggi atau pegunungan. Dengan topografi wilayah yang bervariasi, beberapa wilayah di Kabupaten Brebes termasuk dalam kawasan rawan bencana.

Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1. Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah per kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN	LUAS WILAYAH (km ²)	()
1	Salem	21	-	167,21	9,45
2	Bantarkawung	18	-	208,18	11,76
3	Bumiayu	15	-	82,09	4,64
4	Paguyangan	12	-	108,17	6,11
5	Sirampog	13	-	74,19	4,19
6	Tonjong	14	-	86,55	4,89
7	Larangan	11	-	160,25	9,06
8	Ketanggungan	21	-	153,41	8,67
9	Banjarharjo	25	-	161,75	9,14
10	Losari	22	-	91,79	5,19
11	Tanjung	18	-	72,09	4,07
12	Kersana	13	-	26,97	1,52
13	Bulakamba	19	-	120,36	6,80
14	Wanasari	20	-	75,34	4,26
15	Songgom	10	-	52,65	2,98
16	Jatibarang	22	-	36,39	2,06
17	Brebes	18	5	92,23	5,21
Jumlah		292	5	1.769,62	100

Sumber : Kabupaten Brebes Dalam Angka 2022

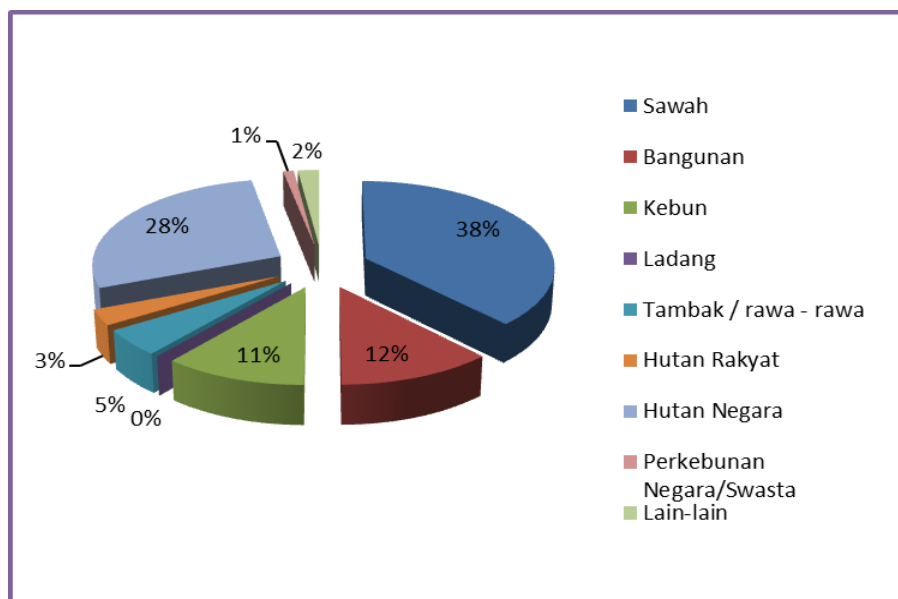
Topografi Wilayah Kabupaten Brebes bervariasi yaitu ketinggian wilayah. Luas wilayah dengan kondisi topografi sangat rendah seluas 84.262,35 hektar atau sekitar 48 dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes. Untuk wilayah dengan kondisi topografi tinggi seluas 20.203,67 hektar atau sekitar 11 dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes yang tersebar di 6 kecamatan yakni Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Ketanggungan, dan Banjarharjo. Dilihat dari ketinggiannya dari permukaan laut, wilayah kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 meter di atas permukaan laut (mdpl), Kecamatan Salem dengan ketinggian 500 mdpl, dan Kecamatan Paguyangan dengan ketinggian 342 mdpl. Sedangkan untuk Kecamatan Larangan, Kecamatan Banjarharjo, dan Kecamatan Ketanggungan tingginya

berkisar antara 23 mdpl, 22 mdpl, dan 17 mdpl. Selain itu wilayah kecamatan lain rata-rata bernilai 1-5 mdpl yang tersebar di wilayah Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasari, Songgom, Jatibarang, dan Brebes yang memiliki wilayah pesisir di bagian utara.

Lahan di wilayah Kabupaten Brebes pemanfaatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk kemiringan kurang dari 8 (datar) dapat digunakan untuk penggunaan tanaman lahan basah, yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Brebes.
2. Kemiringan antara 8-15 (sedang atau berombak), masih dapat digunakan untuk penggunaan lahan pertanian, khususnya pertanian tanaman lahan kering yang meliputi seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Brebes.
3. Kemiringan antara 15-45 (berat atau berbukit), dapat digunakan untuk tanaman keras (tahunan) baik dengan tanaman produksi maupun sebagai tanaman buffer, kondisi ini hampir di seluruh wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan meliputi Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Bumiayu, Sirampog, Larangan, Banjarharjo, Jatibarang, dan Tonjong.
4. Kemiringan lebih dari 45 (sangat berat), kemungkinan longsor cukup tinggi dan diarahkan sebagai kawasan lindung, Kawasan ini terdapat di Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo.

Grafik 1.1. Penggunaan Lahan di Kabupaten Brebes



2. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Brebes menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes akhir semester 1 Tahun 2021 mencapai 1.986.347 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Masing-masing jumlahnya adalah 1.008.774 jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 50,79 dan 977.573 jiwa penduduk perempuan atau sebesar 49,21.

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes bila di lihat per Kecamatan sangat bervariasi, distribusi penduduk Kabupaten Brebes belum tersebar secara merata. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Brebes 184.183 jiwa (9,27), Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Salem sebanyak 63.719 jiwa atau (3,21).

Tabel 1.2. Penduduk Kabupaten Brebes menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio	Luas* Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
Salem	32.321	31.398	63.719	101.99	167,21	380
Bantarkawung	52.738	50.537	103.275	103.50	208,18	494
Bumiayu	57.598	55.131	112.729	103.38	82,09	1.373
Paguyangan	57.606	54.691	112.297	103.63	74,19	1.037
Sirampog	36.021	34.474	70.495	103.66	74,19	972
Tonjong	39.645	38.379	78.024	103.17	86,55	884
Jatibarang	44.912	43.797	88.709	102.17	36,39	2.396
Wanasari	82.405	79.092	161.497	104.04	75,34	2.149
Brebes	93.137	91.046	184.183	102.50	92,23	1.978
Songgom	43.498	42.559	86.057	101.62	52,65	1.617
Kersana	33.849	33.247	67.096	102.42	26,97	2.496
Losari	70.134	68.414	138.548	102.85	91,79	1.510
Tanjung	53.526	51.627	105.153	103.62	72,09	1.459
Bulakamba	93.487	89.857	183.344	104.01	120,36	1.510
Larangan	79.429	77.681	157.110	102.40	160,25	983
Ketanggungan	73.541	71.329	144.870	101.92	153,41	942
Banjarharjo	64.927	64.314	129.241	101.18	161,75	802
Jumlah	1.008.774	977.573	1.986.347	102.90	1.769,62	1.118

Sumber data: BPS Kabupaten Brebes, 2022 dan Dindukcapil Kabupaten Brebes, 2021

Selain itu, angka kepadatan penduduk di Kabupaten Brebes mencapai 1.118 jiwa/km² yang artinya disetiap 1 km² didiami oleh sekitar 1.118 orang penduduk Kabupaten Brebes. Kepadatan paling tinggi ada di Kecamatan Kersana, sedangkan kepadatan penduduk paling rendah ada di Kecamatan Salem.

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan yang dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Pembangunan suatu bangsa tidak dapat mengandalkan dari sumber daya alam semata, maka usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bersifat mutlak, dimana pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Peningkatan di bidang pendidikan akan berimbas pada kualitas penduduk yang semakin baik. Untuk dapat mengetahui seberapa

banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dengan beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Brebes didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan sejak tingkat pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Data tentang perkembangan fasilitas pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2021

Tingkat Pendidikan	2019		2020		2021	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
TK	3	583	3	451	7	467
SD	870	26	869	26	861	31
MI	7	207	7	207	7	209
SDLB	1	1	1	1	1	1
SMP	81	73	81	75	81	82
MTs	4	95	4	95	5	98
SMA	17	14	17	14	17	14
SMK	6	88	6	88	6	89
MA	2	28	2	28	2	29
PT/Akademi	-	6	-	6	-	6

Sumber data : Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes Tahun 2021

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ketersediaan sekolah dihitung dari perbandingan jumlah sekolah jenjang tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang sesuai dikali 10.000.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Perhitungan APK yaitu jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah

penduduk kelompok usia sekolah dikali 100. Makin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan atau semakin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah ditingkat pendidikan tertentu. Di jenjang pendidikan PAUD dan SD/ MI mengalami tren penurunan. Pada tahun 2020 APK pada jenjang PAUD mencapai 72,05 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 69,76. Pada jenjang SD/ MI tahun 2020 APK mencapai 98,17 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 92,44. Hanya pada jenjang SMP/ MTs APK mengalami kenaikan, pada tahun 2020 mencapai 88,22 dan pada tahun 2021 mencapai 92,44.

Isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akan ditangani dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut ini.

- 1) *Penyelenggaraan layanan pendidikan (PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat) belum sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.*

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin mutu pendidikan, layanan pendidikan wajib memenuhi standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu isu strategis yang harus diselesaikan di Kabupaten Brebes selama lima tahun ke depan adalah pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan baik pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, maupun pada pendidikan masyarakat.

- 2) *Pelaksanaan kurikulum termasuk pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan masih perlu penguatan kembali.*

Kurikulum 2013 yang telah mengintegrasikan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, masih perlu penguatan baik dari proses penyusunan dokumen kurikulum, pelaksanaan

kurikulum, maupun supervise pelaksanaan kurikulum tersebut. Kapasitas guru untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 perlu diperhatikan dengan baik. Selain itu fungsi supervisi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah juga perlu perbaikan.

- 3) *Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7 - 15 tahun belum mencapai 100.*

Kewajiban pemerintah daerah untuk menuntaskan pendidikan dasar telah lama dicanangkan sejak Undang-Undang 20 Tahun 2003 mengamanatkan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun. Akan tetapi, diKabupaten Brebes masih terdapat anak usia sekolah 7 – 15 tahun yang belum mengakses layanan pendidikan dasar. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan perumusan program dan kegiatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang belum mengakses layanan pendidikan.

- 4) *Lemahnya sistem penilaian pendidikan.*

Ujian sebagai sistem penilaian pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang proses pembelajaran, dan kemampuan siswa untuk dapat menerima pembelajaran. Dengan kata lain, sistem penilaian pendidikan yang baik dapat secara tepat mencerminkan hasil belajar siswa dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan proses pembelajaran pada masa yang akan datang.

- 5) *Kapasitas dan kualitas layanan pendidikan masyarakat yang masih rendah.*

Baik secara kapasitas maupun kualitas, layanan pendidikan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Layanan pendidikan masyarakat bersifat strategis sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan formal.

6) *Data buta aksara belum mutakhir.*

Diperlukan basis data buta aksara yang valid sebagai salah satu bahan masukan yang penting untuk menentukan pelaksanaan kegiatan intervensi penuntasan buta aksara. Tidak hanya sebatas data yang berkaitan dengan jumlah penduduk buta aksara, tetapi data valid tentang profil pribadi penduduk buta aksara juga diperlukan.

7) *Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan.*

Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dapat dinilai dari penguasaan terhadap kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi seorang guru dan tenaga kependidikan. Kompetensi guru masih menjadi isu yang perlu ditangani mengingat persentase guru yang memperoleh nilai standar hasil uji kompetensi guru masih rendah. Dengan meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan diharapkan kurikulum yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik pada proses pembelajaran.

8) *Kurang meratanya pendistribusian guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan.*

Masih berkaitan dengan guru dan tenaga kependidikan, isu strategis selanjutnya adalah pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan. Diharapkan tidak terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara satuan pendidikan yang berada di perkotaan dengan satuan pendidikan yang berada di pinggiran atau pedesaan dalam hal pemenuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan. Selain itu diperlukan juga pemerataan distribusi guru sesuai dengan mata pelajaran khususnya pada jenjang SMP.

9) *Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan masih rendah.*

Isu strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai adalah masih rendahnya kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil. Dengan

beban tugas dan tanggung jawab yang sama dengan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil, para guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya. Walaupun tentu saja dasar peningkatan kesejahteraan tersebut dengan batasan kriteria tertentu baik dari segi masa kerja, kompetensi, maupun beban mengajarnya.

- 10) *Jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh generasi muda masih rendah.*

Generasi muda sebagai salah satu aset pembangunan yang strategis perlu diberdayakan untuk menjadi salah satu motor penggerak roda pembangunan. Dengan kemampuan wirausaha yang baik diharapkan pemuda dapat menjadi pemuda yang produktif dan tidak menjadi beban bagi masyarakat mengingat spektrum penduduk yang didominasi oleh penduduk dalam usia produktif (pemuda).

- 11) *Masih kurangnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan.*

Organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Organisasi tersebut dapat memberikan masukan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga. Organisasi tersebut juga sebagai wahana bagi masyarakat untuk mengembangkan diri baik di bidang kepemudaan, kepramukaan, maupun keolahragaan.

- 12) *Kurangnya Frekuensi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan.*

Untuk meningkatkan kualitas kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan perlu dipacu dengan lebih meningkatnya frekuensi pelaksanaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun atas prakarsa mandiri masyarakat.

4. Kondisi Kesehatan

Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat ditunjang oleh fasilitas kesehatan, hal ini akan terwujud apabila adanya dukungan pemerintah dan swasta. Pada tahun 2021 jumlah rumah sakit di Kabupaten Brebes mencapai 14 unit terdiri dari rumah sakit umum negeri 2 unit, rumah sakit swasta 12 unit.

Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Brebes terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan rujukan. Disamping pelayanan kesehatan oleh Pemerintah, partisipasi sektor swasta juga semakin meningkat terutama dalam pelayanan kesehatan rujukan. Fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas Induk, Pustu, PKD, Balai pengobatan swasta, RS khusus, Rumah Bersalin, RSUD Pemerintah dan RSUD Swasta. Selengkapnya jumlah fasilitas kesehatan tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.4. Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes

No.	Uraian	Jumlah (Unit)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	2
2.	Rumah Sakit Umum Swasta	12
3.	Puskesmas Induk	38
4.	Puskesmas Pembantu	62
5.	Poliklinik	29
6.	Polindes	255
7.	Apotek	99

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2022

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan, sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

- a. Umur Harapan Hidup Kabupaten Brebes masih dibawah rata-rata UHH Provinsi Jawa Tengah. Rendahnya UHH di Kabupaten Brebes disebabkan karena :
1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), hal ini disebabkan belum semua Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC (Antenatal Care) sesuai dengan standar, masih kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten terhadap penanganan ibu hamil risiko tinggi, belum semua ibu hamil mendapatkan pendampingan, dan belum maksimalnya sistem informasi rujukan persalinan.
 2. Masih tingginya Angka Kematian Bayi Baru Lahir (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), hal ini disebabkan karena
 - a) belum semua bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar,
 - b) masih kurangnya penanganan neonatus komplikasi (BBLR dan asfeksia),
 - c) masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dasar dan rujukan;
- b. Meningkatnya angka kesakitan Penyakit Tidak Menular antara lain jantung, diabetes, kanker, dan stroke hal ini disebabkan karena :
1. Belum sadarnya masyarakat terhadap pola hidup sehat seperti makan buah dan sayur, aktifitas fisik, tidak merokok dan cek kesehatan rutin.
 2. Belum semua desa terdapat posbindu sebagai salah satu sarana skrining Penyakit Tidak Menular.
 3. Belum semua Fasilitas kesehatan mampu melakukan skrining Penyakit Tidak Menular antara lain kanker serviks (IVA) dan pengobatan krioterapi
- c. Masih tingginya penularan penyakit, yaitu HIV/AIDs, TB, kusta, filariasis, pneumonia pada balita, DBD/cikungunya, diare, dan penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi) hal ini disebabkan antara lain :
1. Belum semua anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

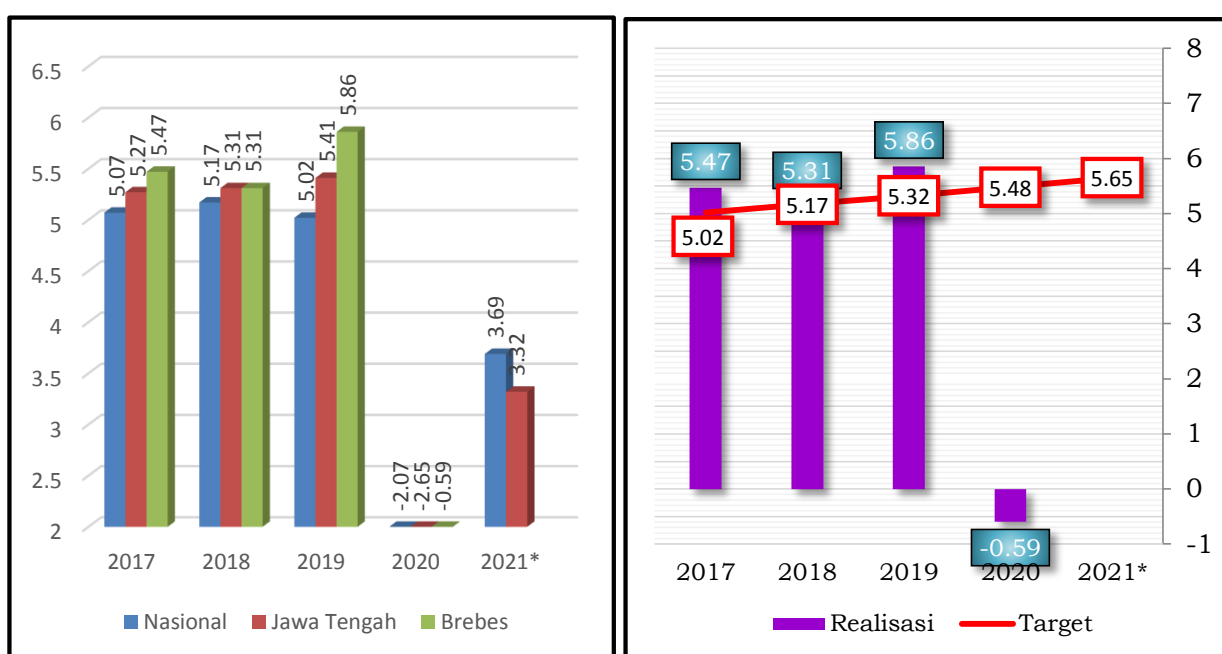
2. Belum semua orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
 3. Belum semua orang terduga TBC dilakukan pemeriksaan dahak.
 4. Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain masih banyaknya perilaku buang air besar sembarangan atau masih ada masyarakat yang tidak mempunyai akses jamban sehat.
- d. Masih tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting. Hal ini disebabkan antara lain :
1. Belum semua Ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standart.
 2. rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya ibu dalam pemberian makanan pendamping ASI,
 3. masih kurangnya cakupan pemberian ASI eksklusif,
 4. belum semua anak BALITA mendapatkan pelayanan sesuai standart antara lain : penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun , pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.

5. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah. Perhitungan pada tingkat regional Kabupaten Brebes menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambahan) pada suatu waktu tertentu. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Brebes masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Dari 5 tahun perencanaan pembangunan, pada tahun 2017 sampai 2019 capaian pertumbuhan ekonomi melampaui target pembangunan. Sedangkan pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Brebes berkontraksi sebesar -0,59%. Analisa

perekonomian nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sampai dengan triwulan III menunjukkan kinerja positif sehingga memberi rasa optimis pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Brebes juga tumbuh positif. Perkiraan berada di angka 3,00 sampai 4,00%. Kinerja positif perekonomian memberi sinyal bahwa dalam pandemi yang belum mereda terdapat pemulihan kondisi yang perlahan membaik. Salah satu kuncinya adalah dengan terus menerapkan protokol kesehatan dan peningkatan cakupan vaksinasi sehingga pandemi tidak meluas dan kehidupan normal akan kembali lagi.

Grafik 1.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2021

Tabel 1.5. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 – 2020 (Jutaan Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.276,34	16.058,01	16.467,51	17.620,68
2.	Pertambangan dan Penggalan	965,25	1.066,48	1.121,28	1.140,04
3.	Industri Pengolahan	6.267,71	6.782,09	7.727,07	7.928,86
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	23,60	25,62	27,12	27,25
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	21,52	22,69	24,18	26,51

NO	URAIAN	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
6.	Konstruksi	1.669,93	1.849,76	2.004,72	1.954,90
7.	PB dan PE, reparasi mobil dan sepeda motor	6.558,79	7.092,76	7.699,77	7.560,50
8.	Transportasi dan pergudangan	1.107,85	1.194,97	1.327,64	927,62
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.726,20	1.893,38	2.120,57	2.017,87
10.	Informasi dan komunikasi	1.274,20	1.458,05	1.653,11	1.858,69
11.	Jasa Keuangan dan asuransi	735,45	789,61	829,22	837,55
12.	Real Estate	438,92	475,80	509,73	513,10
13.	Jasa Perusahaan	109,46	123,23	140,84	137,49
14.	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	843,94	891,16	924,09	924,20
15.	Jasa pendidikan	1.821,48	2.026,14	2.243,62	2.282,09
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	310,93	343,29	374,69	408,06
17.	Jasa lainnya	36,16	925,44	1.020,16	977,78
TOTAL		39.987,73	42.955,83	46.215,35	47.143,20

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Brebes, 2021

Jika diperhatikan PDRB perkapita Kabupaten Brebes terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Brebes adalah 2,01 persen lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya. Kelompok usaha informasi dan komunikasi merupakan sektor yang tumbuh paling tinggi yaitu 12,44 persen, disusul kelompok usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 9,64 persen.

**Tabel 1.6. Persentase PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2017 – 2020**

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38.42	37.33	35.63	37.38
2.	Pertambangan dan Penggalian	2.37	2.48	2.43	2.42
3.	Industri Pengolahan	15.54	15.77	16.72	16.82
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.06	0.06
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	0.05	0.05	0.05	0.06
6.	Konstruksi	4.15	4.30	4.34	4.15
7.	PB dan PE, reparasi mobil dan sepeda motor	16.41	16.49	16.66	16.04
8.	Transportasi dan pergudangan	2.89	2.78	2.87	1.97
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4.35	4.40	4.59	4.28
10.	Informasi dan komunikasi	3.10	3.39	3.58	3.94
11.	Jasa Keuangan dan asuransi	1.83	1.84	1.79	1.78
12.	Real Estate	1.09	1.11	1.10	1.09
13.	Jasa Perusahaan	0.27	0.29	0.30	0.29
14.	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	2.11	2.07	2.00	1.96
15.	Jasa pendidikan	4.51	4.71	4.85	4.84
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0.78	0.80	0.81	0.87
17.	Jasa lainnya	2.07	2.15	2.21	2.07
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Brebes, 2021

Dilihat dari struktur ekonominya, Kabupaten Brebes masih didominasi oleh kelompok usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, dimana menyumbang 37,38 persen terhadap perekonomian Brebes. Kabupaten Brebes sebagai wilayah dengan pertanian yang luas kontras dengan distribusi terhadap perekonomian daerah yang terus menurun. Hal ini dindikasikan adanya perubahan lahan pertanian menjadi kawasan industri dengan melihat distribusi pada sektor industri pengolahan yang menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Disisi lain minat penduduk Kabupaten Brebes akan sektor pertanian juga semakin menurun. Angkatan

Kerja di Kabupaten Brebes memilih bekerja sebagai pekerja pada industri pengolahan besar atau merantau di luar daerah.

6. SDM Pemerintah Kabupaten Brebes

Salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes berdasarkan Buku Brebes Dalam Angka Tahun 2021 bahwa pada tahun 2020 sebanyak 9.035 orang yang terdiri dari PNS laki-laki 4.714 orang dan PNS perempuan sebanyak 4.321 orang.

Tabel 1.7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Brebes Tahun 2021

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SD / Sederajat	5	-	5
2.	SLTP / Sederajat	25	-	25
3.	SLTA / Sederajat	1.344	661	2.005
6.	Diploma	200	576	776
7.	Sarjana, Magister & Spesialis	3.140	3.084	6.224
	JUMLAH	4.714	4.321	9.035

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Brebes, 2021

Pemerintah Kabupaten Brebes membutuhkan Sumber Daya Manusia yang handal, berintegritas dan mempunyai kinerja yang baik sehingga maksimal dalam pelayanan terhadap masyarakat. Disamping SDM juga diperlukan penerapan teknologi pendukung kinerja pemerintahan. Beberapa pekerjaan sekarang sudah berbasis aplikasi atau web, diantaranya :

- SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
- SIMDA (Sistem Keuangan Daerah)
- SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)

- SITAMPAN (Sistem Administrasi Pengadaan dan Pengadaan Langsung)
- SIM IKM (Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat)
- SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
- SIMKEUDES (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa)
- SIRUP (Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan)

C. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Adapun Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Daerah, sejumlah 21 Dinas, yaitu :
 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora)
 - Dinas Kesehatan (Dinkes)
 - Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
 - Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR)
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim)
 - Dinas Sosial (Dinsos)
 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades)
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB)
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS)

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil)
- Dinas Perhubungan (Dinhub)
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfo)
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinkopumdag)
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker)
- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar)
- Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus)
- Dinas Perikanan (Dinkan)
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH)

5. Badan

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda)
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Bakesbangpolda)

6. Lembaga Teknis Daerah lainnya, yaitu :

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- RSUD Brebes
- RSUD Bumiayu

7. Kecamatan sejumlah 17 Kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Brebes
- Kecamatan Wanasari
- Kecamatan Bulakamba
- Kecamatan Jatibarang
- Kecamatan Songgom
- Kecamatan Tanjung
- Kecamatan Losari
- Kecamatan Larangan

- Kecamatan Ketanggungan
- Kecamatan Kersana
- Kecamatan Banjarharjo
- Kecamatan Tonjong
- Kecamatan Bumiayu
- Kecamatan Sirampog
- Kecamatan Paguyangan
- Kecamatan Bantarkawung
- Kecamatan Salem

Kelurahan sejumlah 5 kelurahan, yaitu :

- Kelurahan Brebes
- Kelurahan Pasarbatang
- Kelurahan Limbangan Wetan
- Kelurahan Limbangan Kulon
- Kelurahan Gandasuli

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

D. Permasalahan Utama Kabupaten Brebes Tahun 2021

Ada beberapa permasalahan utama yang sedang berkembang di Kabupaten Brebes pada tahun 2021, diantaranya upaya peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan pelayanan dasar kesehatan serta kemiskinan. Untuk itu strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan mengacu pada permasalahan yang menonjol sebagai isu strategis, baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten.

Adapun permasalahan utama Kabupaten Brebes, secara singkat di rinci sebagai berikut :

- 1) Angka kemiskinan masih tinggi
- 2) Nilai IPM masih rendah di Provinsi Jawa Tengah
- 3) Cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat
- 4) Kondisi sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
- 5) Kualitas dan kelestarian sumber daya alam

- 6) Pertumbuhan ekonomi dan Iklim investasi yang kurang berkembang
- 7) Tingkat pengangguran yang cukup tinggi
- 8) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes adalah perencanaan pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi, misi pembangunan agar pembangunan lebih terarah dan terukur dalam pencapaian sasaran strategis selama lima tahun.

Tahun 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017–2022. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan mengacu pada RPJMD Tahun 2017–2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 dengan Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017–2022 adalah untuk mencapai visi:

“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”

Visi tersebut merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam lima tahun. Penjelasan dari visi Kabupaten Brebes tersebut, sebagai berikut:

1. Brebes Unggul

Frasa unggul diartikan sebagai “lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain” (KKBI). Kabupaten Brebes Unggul dimaknai sebagai cita-cita

pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Brebes menjadi lebih baik dan lebih unggul dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Menciptakan keunggulan daerah diawali dengan membangun keunggulan kualitas sumber daya manusia Brebes, yang difokuskan pada pendidikan, keterampilan, keahlian, serta didukung dengan kualitas kesehatan yang semakin baik.

2. Brebes Sejahtera

Sejahtera dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Brebes adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menyediakan ruang ekonomi seluas-luasnya bagi masyarakat Brebes. Dengan membangun perekonomian daerah inklusif dan berkelanjutan, yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan, dan memperluas akses bekerja, maka diharapkan akan mampu menggerakkan pendapatan per kapita, meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brebes sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan menyediakan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat dan dunia usaha.

3. Brebes Berkeadilan

Berkeadilan dimaknai sebagai satu kewajiban pemerintah daerah untuk memperluas distribusi akses dan hasil pembangunan untuk seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Tidak hanya distribusi secara kewilayahan, tetapi juga hasil pembangunan mampu dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, lintas gender, lintas usia dan lintas generasi.

b. Misi

Misi merupakan penjabaran mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk tercapainya visi. Misi pembangunan Kabupaten Brebes yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

c. Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, yang dijabarkan secara lebih operasional dari setiap misi. Tujuan kemudian dijabarkan dalam sasaran, yaitu sebuah rumusan kondisi yang dapat menggambarkan tercapainya sebuah tujuan. Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya pada setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat;

2. Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha;
3. Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan masyarakat yang partisipatif;
7. Memantapkan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik;
8. Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan;
9. Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata, dengan indikator Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Identitas Anak;
10. Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal.

d. Sasaran Strategi

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan, ditindaklanjuti dengan sasaran strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- 2) Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- 3) Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik;
- 4) Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat;
- 5) Meningkatnya cakupan sanitasi;
- 6) Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik;

- 7) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat;
- 8) Menurunnya kawasan permukiman kumuh;
- 9) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- 10) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian;
- 11) Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan;
- 12) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;
- 13) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata;
- 14) Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 15) Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah;
- 16) Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja;
- 17) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 18) Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- 19) Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten;
- 20) Meningkatnya kualitas kelitbangan;
- 21) Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat;
- 22) Desa mampu menyusun RPJMDes tepat waktu;
- 23) Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu;
- 24) Desa memiliki BUMDes;
- 25) Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan
- 26) Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata;
- 27) Meningkatnya penanganan PMKS

e. Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2021

Mendasarkan pada isu strategis, serta kebijakan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, serta

RKPD Kabupaten Brebes tahun 2021 ditujukan untuk:
“Penguatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju SDM yang Berdaya Saing dan Mendorong Pengembangan *Digital Economy*”

Disusun prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes. Seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Prioritas Pembangunan Daerah

No	Misi RPJMD Periode Tahun 2017-2022	Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2021
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.	1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi; 2. Peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama prasarana dan sarana kesehatan;
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.	3. Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3.	Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal	4. Perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan perkuatan inovasi, pengembangan <i>digital economy</i> dan ekonomi kreatif serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan <i>start up</i> bisnis baru;
4.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah	5. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih hingga ditingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah;

No	Misi RPJMD Periode Tahun 2017-2022	Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2021
5.	Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.	6. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih hingga ditingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah;
6.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.	7. Peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.

f. Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021

Mendasarkan pada isu strategis, sasaran pembangunan tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bre bes Tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-rata Lama Sekolah
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia Harapan Hidup
3	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	Rasio Jalan Baik
4	Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat	Cakupan akses air minum layak
5	Meningkatnya cakupan sanitasi	1. Cakupan akses jamban 2. Persentase kawasan bebas banjir perkotaan 3. Persentase penanganan persampahan
6	Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik	Rasio jaringan irigasi baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
7	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni
8	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Persentase permukiman kumuh
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Tutupan Lahan
10	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian
11	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan
12	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan
13	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata
14	Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya alam, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup	1. Laju kenaikan investasi 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)
15	Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan
16	Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2. Rasio penduduk yang bekerja
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM
18	Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Indeks nilai hasil evaluasi LPPD 2. Opini BPK
19	Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	Indeks Profesionalitas ASN
20	Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
21	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan serta kenyamanan lingkungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)
22	Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu
23	Desa mampu menyusun APBDDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun APBDDes tepat waktu
24	Desa yang memiliki BUMDes	Rasio desa yang memiliki BUMDes
25	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	1. Harapan Lama sekola 2. Rata-rata Lama Sekolah 3. Usia Harapan Hidup 4. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) 5. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 6. Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN 7. Persentase penanganan korban KDRT
26	Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	1. Prevalensi anak bekerja 2. Rasio perkawinan anak 3. Cakupan anak memiliki akte 4. Persentase penanganan korban kekerasan pada anak
27	Meningkatnya penanganan PMKS	1. Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial 2. Persentase PMKS penerima KUBE

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2021 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang *seharusnya* terwujud akibat/dampak kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja Tahun 2021, disusun prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes.

Diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam penyusunan Penetapan Kinerja bertujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan untuk dicapai pada tahun 2021 tersebut di atas selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati yang ditetapkan setelah disahkannya APBD Kabupaten Tahun 2021. Di dalam dokumen Penetapan Kinerja, tercantum sasaran strategis, indikator kinerja setiap sasaran strategis, dan target setiap

indikator kinerja dimaksud baik bersifat kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat diukur tingkat capaian kinerjanya pada akhir tahun.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja secara lengkap disajikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Pengukuran Kinerja

Setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja dan pengukuran kinerja sasaran merupakan instrumen manajemen untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dari instansi pemerintah atas kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun melalui media pelaporan.

Pengukuran kinerja sasaran merupakan jembatan antara target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 dengan capaian kinerjanya pada akhir tahun 2021 serta mengetahui tingkat akuntabilitas pelaksanaannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya pada setiap pelaksanaan urusan pemerintahan.

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Brebes dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53

Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

→ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

→ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90,1 s.d lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75,1 s.d 90	Tinggi / Berhasil
65,1 s.d 75	Sedang / Cukup Berhasil
50,1 s.d 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d 50	Sangat Rendah / Sangat Tdk Berhasil

2. Capaian Kinerja Sasaran

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indicator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil dan sangat tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Jml Indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil	: 95
Berhasil	: 82,5
Cukup Berhasil	: 70
Tidak Berhasil	: 57,5
Sangat Tidak Berhasil	: 25

B. Capaian Kinerja Tahun 2021

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2021. Secara umum realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes dapat dicapai dengan baik dan disajikan pula informasi kinerja lainnya yang telah dicapai sampai dengan akhir Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Brebes telah menetapkan 6 (enam) Misi dan 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 45 (empat puluh lima) indikator sasaran. Realisasi kinerja pada akhir tahun menunjukkan bahwa secara keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 215.93. Suatu organisasi dinyatakan berhasil apabila hasil capaian target kinerjanya melebihi 75 dari target kinerja perencanaan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Brebes ditetapkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 041 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

Hingga akhir tahun 2021 capaian indikator kinerja utama Kabupaten Brebes, sebagai berikut:

***Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021
Capaian Kinerja Sasaran***

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROSENTASE CAPAIAN
1	2	3
1	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	92.68
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	101.58
3	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	95.94
4	Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat	106.44
5	Meningkatnya cakupan sanitasi	97.95
6	Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik	115.68
7	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	114.13
8	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	-5.20

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROSENTASE CAPAIAN
1	2	3
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	90.07
10	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	84.25
11	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	138.56
12	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	126.04
13	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	38.30
14	Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya alam, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup	6155.18
15	Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah	100
16	Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	90.65
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	101.25
18	Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	<i>Dalam Proses</i>
19	Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	115.59
20	Meningkatnya kualitas kelitbangan	100
21	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan serta kenyamanan lingkungan masyarakat	100
22	Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	100
23	Desa mampu menyusun APBDDes tepat waktu	100
24	Desa yang memiliki BUMDes	100
25	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	110.12
26	Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	-25.58
27	Meningkatnya penanganan PMKS	78.57
Rata – rata Capaian Kinerja Tahun 2021		323.93

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa :

- 32 indikator dengan kategori "Sangat berhasil"
- 4 indikator dengan kategori "Berhasil"
- 1 indikator dengan kategori "Cukup Berhasil"

- 2 (tidak ada) indikator dengan kategori "Tidak Berhasil"
- 4 indikator dengan kategori "Sangat Tidak Berhasil"
- 2 indikator masih dalam proses hasil penilaian (evaluasi LPPD dan Opini BPK)

Adapun realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2021 apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Capaian Kinerja 2020	2021			Status Capaian 2021 terhadap 2020	Ket.
			Targe t	Realis asi	Capaian		
1.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	99.75	12.25	12.05	98.37	▽	△ = naik ▽ = turun ○ = tetap
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	89.48	7.15	6.22	86.99	▽	
3	Usia Harapan Hidup (tahun)	101.29	68.46	69.54	101.58	△	
4	Rasio jalan baik (%)	104.41	81	77.71	95.94	▽	
5	Cakupan akses air minum layak (%)	106.58	89.95	95.74	106.44	▽	
6	Cakupan akses jamban (%)	151.88	74.25	100	134.68	▽	
7	Persentase kawasan bebas banjir perkotaan (%)	98.96	98	94.29	96.21	▽	
8	Persentase Penanganan Persampahan (%)	70.76	28.66	18.04	62.94	▽	
9	Rasio jaringan irigasi baik (%)	115.76	64.04	74.08	115.68	▽	
10	Rasio rumah layak huni (%)	115.50	87.41	99.76	114.13	▽	
11	Persentase permukiman kumuh (%)	80.09	18.64	38.25	-5.20	▽	
12	Indek Kualitas Air	82.64	47.6	50	105.04	△	

No	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Capaian Kinerja 2020	2021			Status Capaian 2021 terhadap 2020	Ket.
			Targe t	Realis asi	Capaian		
13	Indeks Kualitas Udara	99.42	84.4	81.07	96.05	△	
14	Indek Kualitas Tutupan Lahan	99.25	68.5	47.35	69.12	△	
15	Kontribusi sektor pertanian (juta rupiah)	88.85	21,219 .108	17,877 .527	84.25	▽	
16	Kontribusi sektor industri pengolahan (juta rupiah)	130.68	6,198. 153	8,588. 388	138.56	△	
17	Kontribusi sektor perdagangan (juta rupiah)	121.93	6,271. 182	7,904. 441	126.04	△	
18	Kontribusi sektor pariwisata (juta rupiah)	43.38	2,592. 318	992.86 9	38.30	▽	
19	Laju kenaikan investasi (%)	114.00	2	240.83	12042	△	
20	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA / PMDN) (milyar rupiah)	429.33	1,384	3,714	268.35	▽	
21	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan (%)	66.67	80	80	100.00	△	
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	96.25	70.73	63.97	90.44	▽	
23	Rasio penduduk yang bekerja (%)	94.11	66.15	60.1	90.85	▽	
24	Nilai SKM	102.41	79.39	80.38	101.25	▽	
25	Indeks nilai hasil evaluasi LPPD	<i>Sangat Tinggi</i>	Tinggi	Masih Proses	Masih Proses		
26	Opini BPK	<i>WTP</i>	WTP	Masih Proses	Masih Proses		
27	Indeks Profesionalitas ASN	168.28	63.45	73.34	115.59	▽	
28	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah (%)	166.67	80	80	100.00	▽	
29	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan	100.00	100	100	100.00	○	

No	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Capaian Kinerja 2020	2021			Status Capaian 2021 terhadap 2020	Ket.
			Target	Realisasi	Capaian		
	keindahan) (%)						
30	Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)	100.00	68.49	68.49	100.00	△	
31	Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%)	100.00	68.49	68.49	100.00	△	
32	Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)	100.00	68.49	68.49	100.00	△	
33	Harapan Lama sekolah (tahun)	99.75	12.25	12.05	98.37	▽	
34	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	89.48	7.15	6.22	86.99	▽	
35	Usia Harapan Hidup (tahun)	101.29	68.46	69.54	101.58	△	
36	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) (ribu rupiah)	156.28	6,455	10,152	157.27	△	
37	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	100.00	2.17	1.36	62.67	▽	
38	Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)	166.70	28.67	36.03	125.67	▽	
39	Persentase penanganan korban KDRT (%)	100.00	100	100	100	○	
40	Prevalensi anak bekerja (%)	200.00	0.0182	0	200	○	
41	Rasio perkawinan anak (%)	196.67	0.42	2.95	-502.38	▽	
42	Cakupan anak memiliki akte (%)	90.32	97	97.04	100.04	△	
43	Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)	100.00	100	100	100	○	
44	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)	166.67	70	100	142.86	▽	
45	Persentase PMKS penerima KUBE (%)	100.00	7	1	14.29	▽	

CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata – rata sesuai dengan Metode rata–rata data kelompok, maka dari 27 Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja tersebut, memiliki capaian kinerja masing – masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.4. Rata – rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata – rata	Kategori	Rincian Kategori untuk Indikator					
					Belum diketahui	Sangat rendah 0 < 50	Rendah 50,1 sd. 65	Sedang 65,1 sd. 75	Tinggi 75,1 sd. 90	Sangat Tinggi 90,1 sd. lebih
1.	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	2	92.68	Sangat Tinggi	-	-	-	-	1	1
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	1	101.58	Sangat tinggi	-	-	-	-	-	1
3	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	1	95.94	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
4	Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat	1	106.44	Sangat tinggi	-	-	-	-	-	1
5	Meningkatnya cakupan sanitasi	3	97.95	Sangat tinggi	-	-	1	-	-	2
6	Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik	1	115.55	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
7	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	1	114.13	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
8	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	1	-5.20	Sangat Rendah	-	1	-	-	-	-
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	90.07	Tinggi	-	-	-	1	-	2
10	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	1	84.25	Tinggi	-	-	-	-	1	-
11	Meningkatnya	1	138.56	Sangat	-	-	-	-	-	1

No.	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata - rata	Kategori	Rincian Kategori untuk Indikator					
					Belum diketahui	Sangat rendah 0 < 50	Rendah 50,1 sd. 65	Sedang 65,1 sd. 75	Tinggi 75,1 sd. 90	Sangat Tinggi 90,1 sd. lebih
	kontribusi sektor industri pengolahan			Tinggi						
12	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	1	126.04	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
13	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	1	38.30	Sangat Rendah	-	1	-	-	-	-
14	Meningkatnya laju investasi daerah dg memperhatikan ketersediaan sumberdaya alam, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup	2	6155.18	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	2
15	Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah	1	100	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
16	Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	2	90.65	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	2
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	101.25	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
18	Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	2	Dalam Proses	Belum Diketahui	2	-	-	-	-	-
19	Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	1	115.59	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
20	Meningkatnya kualitas kelitbangan	1	100	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
21	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan serta kenyamanan lingkungan masyarakat	1	100	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
22	Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	1	100	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
23	Desa mampu menyusun APBDDes tepat	1	100	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1

No.	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata – rata	Kategori	Rincian Kategori untuk Indikator					
					Belum diketahui	Sangat rendah 0 < 50	Rendah 50,1 sd. 65	Sedang 65,1 sd. 75	Tinggi 75,1 sd. 90	Sangat Tinggi 90,1 sd. lebih
	waktu									
24	Desa yang memiliki BUMDes	1	100	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
25	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	7	110.12	Sangat Tinggi	-	-	1	-	-	6
26	Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	4	-25.58	Sangat Rendah	-	1	-	-	-	3
27	Meningkatnya penanganan PMKS	2	78.57	Tinggi	-	1	-	-	-	1
Rata-rata Capaian Sasaran strategis			323.93	Sangat Tinggi	2	4	2	1	2	34

Rata – rata capaian sasaran strategis sebesar 215,93% dengan kategori Sangat Tinggi.

Capaian dari 27 (dua puluh tujuh) Sasaran Strategis:

- ◀ 21 Sasaran dengan kategori sangat Tinggi
- ◀ 3 Sasaran dengan kategori Tinggi
- ◀ - Sasaran dengan kategori Sedang
- ◀ 2 Sasaran dengan kategori Sangat Rendah
- ◀ 1 Sasaran dengan kategori Belum Diketahui Hasilnya

CAPAIAN KINERJA MENURUT MISI

Adapun capaian indikator kinerja sasaran menurut misi dapat disimpulkan dari 45 Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Menurut Misi

No	Misi/kategori	Jumlah Indikator	Presentase
1	MISI 1	3	
	Sangat Berhasil	2	
	Berhasil	1	
	Cukup Berhasil	-	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	-	
2	MISI 2	11	
	Sangat Berhasil	8	
	Berhasil	-	
	Cukup Berhasil	1	
	Tidak Berhasil	1	
	Sangat Tidak Berhasil	1	
3	MISI 3	9	
	Sangat Berhasil	5	
	Berhasil	3	
	Cukup Berhasil	-	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	1	
4	MISI 4	6	
	Sangat Berhasil	4	
	Berhasil	-	
	Cukup Berhasil	-	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	-	
	Belum diketahui	2	
5	MISI 5	3	
	Sangat Berhasil	3	

	Berhasil	-	
	Cukup Berhasil	-	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	-	
6	Misi 6	13	
	Sangat Berhasil	10	
	Berhasil	-	
	Cukup Berhasil	-	
	Tidak Berhasil	1	
	Sangat Tidak Berhasil	2	

C. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

MISI - I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi, berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan

Sasaran Strategis “Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan” sebagaimana tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes tahun 2017–2022, terdiri dari 2 Indikator Kinerja yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Secara keseluruhan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :

Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Harapan Lama Sekolah	Tahun	99.75	12.25	12.05	98.37	12.43
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	89.48	7.15	6.22	86.99	7.37
Rata-rata		94.62			92.68	

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, tahun 2021 Harapan Lama Sekolah telah mencapai 12,05 tahun, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Secara nasional angka Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar 13,08 yang berarti capaian Kabupaten Brebes berada di bawah angka nasional.

Sementara itu angka rata-rata Lama Sekolah tercapai 6.22 tahun, yang berarti rata-rata penduduk Kabupaten Brebes usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Secara nasional angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia sebesar 8,54 tahun pada 2021. Dengan demikian, rata-rata penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas IX.

Secara umum capaian dari Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dapat dicapai yaitu sebesar 92,68 atau tercapai dengan kategori **Berhasil**.

Dalam mengukur Indikator Kinerja Utama, didasarkan pada Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Target	Realisasi	Capaian
1	APK PAUD	%	105.96	70	69.76	99.66
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	98.17	100	92.44	92.44
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	96.95	92	91.44	99.39
4	Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	100.64	88	85.81	100.92
5	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	91.27	71	68.64	96.68
6	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	76.92	0.09	0.06	66.67
7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	48.08	0.23	0.28	21.73
8	Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99.26	94.75	93.80	99.00
9	Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK	%	95.54	85	79.54	93.60
10	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100
11	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	100
12	Angka Kelulusan Paket A	%	100	100	98	98.00
13	Angka Kelulusan Paket B	%	100	100	99	99.00
14	Angka Kelulusan Paket C	%	100	100	98	98.00
15	Angka Melek Huruf Penduduk lebih dari 15 Tahun	%	98.49	97	97.50	100.51
16	Rata-rata Nilai US SD : 1. Bahasa Indonesia 2. Matematika 3. IPA	Poin	108.56 123.33 128.67	62 52 52	75.52 71.61 74.60	121.80 137.71 143.46
	Rata-rata Nilai UN SMP : 1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. Matematika 4. IPA	Poin	101.25 107.88 104.41 95.77	62 52 52 51	76.91 71.28 69.91 71.31	124.04 137.07 134.44 139.82
17	Prosentase Kelompok Pemuda Produktif yang berprestasi	%	100.9	142.86	20	139.99

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Target	Realisasi	Capaian
18	Prosentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	122.18	100	83.33	83.33
19	Prestasi Olahraga	medali	95	53	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Angka Partisipasi Murni SD/MI, dengan capaian kinerja 100.92%, pada indikator Angka Kelulusan SD/MI, dengan capaian kinerja 100%, pada indikator Angka Kelulusan SMP/MTs, dengan capaian kinerja 100%, pada indikator Angka Melek Huruf Penduduk lebih dari 15 Tahun, dengan capaian kinerja 100.51%, pada indikator Persentase Kelompok Pemuda Produktif yang berprestasi, dengan capaian kinerja 139.99%, pada indikator Prosentase Organisasi Kepemudaan yang aktif, dengan capaian kinerja 83.33%.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator APK PAUD, dengan capaian kinerja 99.66%, indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI, dengan capaian kinerja 92.44%, indikator Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs, dengan capaian kinerja 99.39%, indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs, dengan capaian kinerja 96.68%, indikator Angka Putus Sekolah SD/MI, dengan capaian kinerja 66.67%, indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs, dengan capaian kinerja 21.73%, indikator Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs, dengan capaian kinerja 99.00%, indikator Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK, dengan capaian kinerja 93.60%, dan indikator Prestasi Olahraga, dengan capaian 0%.

Dari 19 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada tahun 2021, 5 indikator menunjukkan capaian 100% atau **melebihi target**, dan 13 indikator menunjukkan capaian

kurang dari 100% atau **tidak tercapai**, dan 2 indikator yang menunjukan capaian 100% **sesuai target**.

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dan dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk target IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100% dan belum tersedia datanya pada tahun 2021, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, focus, dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhinya.

Sasaran Strategis 2 **Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat**

Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat” sebagaimana tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes tahun 2017–2022, terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu Usia Harapan Hidup. Hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut :

Tabel 3.8. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Usia Harapan Hidup	Tahun	101.29	68.46	69.54	101.58	68.47

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, tahun 2021 Usia Harapan Hidup mencapai 69,54 Tahun yang berarti bahwa setiap bayi yang lahir dapat hidup hingga 69 tahun. Secara nasional angka Usia Harapan Hidup tercatat sebesar 71,57 yang berarti capaian Kabupaten Brebes berada di bawah angka nasional.

Dari tabel diatas untuk capaian dari Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dapat dicapai yaitu sebesar 101,58 atau tercapai dengan kategori **Sangat Berhasil** dan melampaui target yang ditetapkan.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Capaian Tahun Sebelumnya (2020)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (%)	94	88,52	94,2	96,9
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)	97	99,60	102,7	103,6
		Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (%)	97	98,40	101,4	102,3
		Pelayanan Kesehatan Balita (%)	93	79,68	85,7	84,7
		Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	86	79,33	92,2	66,7
		Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif (%)	79	33,95	43	25,5
		Pelayanan Kesehatan Pada	46	46,22	100,5	76,2

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Capaian Tahun Sebelumnya (2020)
		Usia Lanjut (%)				
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	100	38,60	38,6	25,6
		Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus (%)	100	70,39	70,39	72,6
		Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (%)	100	52,85	52,85	46,4
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (%) *	85	33,85	39,8	47,3
		Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (%)	80	71,08	88,85	98,5
		AKB/100.000 KLH	29	9,45	32,6	120,8
		Kasus Kematian Ibu	11,9	103	0	0

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat dari 14 indikator yang ada, 3 indikator telah melampaui target (21 %) dan ada 11 indikator belum mencapai target (79 %). Adapun capaian masing-masing indikator dari sasaran 1 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2021 belum mencapai target yaitu sebesar 94,2 %, capaian ini masuk dalam kategori “Baik” dan capaian ini ada penurunan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 96,9%.

Salah satu penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan ibu hamil adalah cakupan kunjungan ke 4 (K4). Bila melihat perkembangan cakupan K4 di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.1. Cakupan K4 Di Kabupaten Brebes



Rendahnya cakupan K4 di Kabupaten Brebes disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- Mobilitas ibu hamil ke luar kota yang cukup tinggi sebelum mencapai K4.
- Adanya persalinan premature, sehingga ibu hamil tidak dapat mencapai K4.
- Adanya kasus abortus pada ibu hamil.

Gambar 3.1. Kegiatan Kelas Ibu Hamil



2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian kinerja pelayanan kesehatan ibu bersalin pada tahun 2021 telah melampaui target yaitu sebesar 102,7%, capaian ini masuk dalam kategori “Sangat Baik” akan tetapi ada sedikit penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 103,6%

Penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan pelayanan pasca persalinan. Bila melihat perkembangan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan pelayanan pasca persalinan di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.2. Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan



Gambar 3.2. Pemeriksaan Kehamilan Menjelang Persalinan

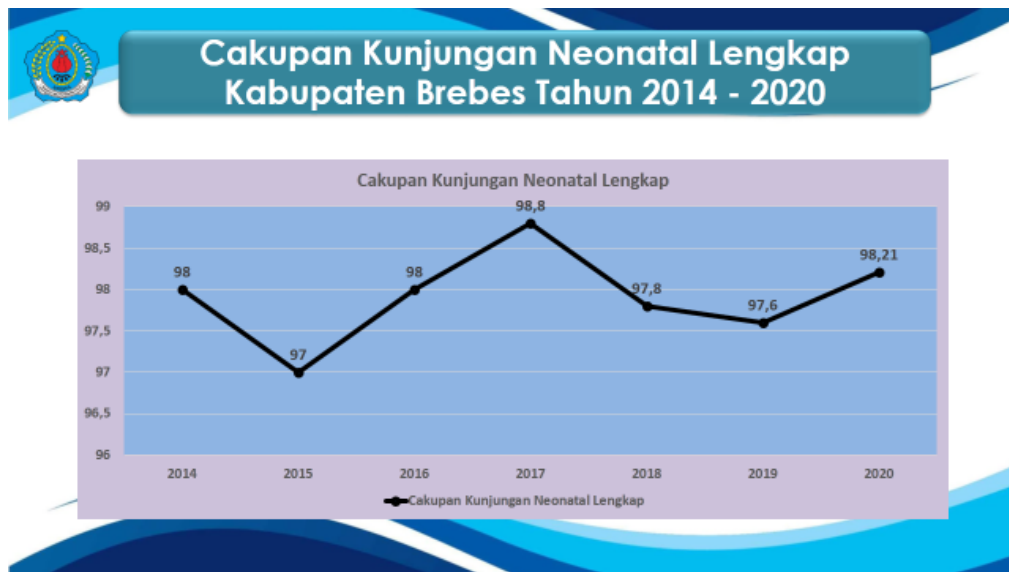


3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Capaian kinerja pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2021 telah melampaui target yaitu sebesar 101,4 %, capaian ini masuk dalam kategori “Sangat Baik” capaian ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 102,3%.

Salah satu penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah pelayanan kesehatan neonatal. Bila melihat perkembangan pelayanan kesehatan neonatal di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.3. Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap



Gambar 3.3. Pelayanan Posyandu Untuk Batita



4. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian kinerja pelayanan kesehatan balita pada tahun 2021 belum melampaui target yaitu sebesar 85,7 %, capaian ini dapat dikategorikan “Baik” dan capaian tahun 2021 ini mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 84,7%.

Tidak tercapainya indikator ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yaitu:

- a. Masih rendahnya kesadaran para ibu untuk membawa anak balitanya ke Posyandu terutama yang berusia 3 sampai 5 tahun.
- b. Mobilitas keluarga ke luar kota yang cukup tinggi (urban)
- c. Belum semua balita mendapat pelayanan yang standar sesuai SOP karena masih ada fasilitas kesehatan yang secara sarana prasarana nya masih belum tercukupi sesuai standar.

Gambar 3.4. Pelayanan Penimbangan Anak Balita



5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian kinerja pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada tahun 2021 tidak mencapai target yaitu sebesar 92,2%, capaian ini dikategorikan “Baik”. Capaian tahun 2021 ini meningkat jika dengan capaian capaian tahun 2020 yaitu 66,7 %.

Capaian kinerja ini tidak mencapai target disebabkan karena adanya kebijakan terkait penanggulangan wabah *covid 19* dengan ditiadakannya pembelajaran tatap muka di semua jenjang pendidikan, hal ini menyebabkan kegiatan penjangkaran di setiap sekolah sangat terbatas.

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Capaian kinerja pelayanan kesehatan pada usia produktif pada tahun 2021 hanya sebesar 43 % jauh di bawah target yang ditetapkan dan masuk ke kategori “Kurang”, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang hanya sebesar 25,5% maka terdapat perkembangan yang cukup signifikan.

Berdasarkan Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa semua penduduk usia 15 – 59 tahun harus diperiksa sebagai berikut:

- a) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut.
- b) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
- c) Deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah.
- d) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
- e) Pemeriksaan ketajaman penglihatan.
- f) Pemeriksaan ketajaman pendengaran.
- g) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30 – 59 tahun.

Untuk capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kabupaten Brebes baru sebesar 25,4 %. Artinya baru 25,4 % penduduk usia 15 – 59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 7 parameter tersebut. Hal ini disebabkan karena:

- 1) Keterbatasan sumber daya kesehatan untuk menjangkau seluruh penduduk usia produktif.
- 2) Belum ada sistem informasi yang terpadu untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan sesuai 7 parameter tersebut.
- 3) Kurangnya kesadaran penduduk usia produktif untuk melakukan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular.

- 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular masih belum dianggap sepenuhnya sebagai sesuatu yang penting.
- 5) Masih kurangnya kader posbindu yang terlatih.
- 6) Masih lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

Meskipun capaian indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif Kabupaten Brebes baru 25,4 %, bukan berarti 74,6 % penduduk Kabupaten Brebes usia 15 – 59 tahun lainnya tidak mendapat pelayanan kesehatan sama sekali, karena kebanyakan mereka hanya mendapat pelayanan kesehatan 3 sampai 4 parameter pemeriksaan saja.

Gambar 3.5. Pengukuran Kebugaran dan Kesehatan Karyawan Puskesmas



7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Capaian kinerja pelayanan kesehatan pada usia lanjut pada tahun 2021 telah melampaui target yaitu sebesar 100,5%, dan capaian ini masuk kategori “Sangat Baik”. Capaian kinerja ini juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 76,2 %.

Gambar 3.6. Kegiatan Posyandu Lansia



8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian kinerja pelayanan kesehatan penderita hipertensi pada tahun 2021 masih di bawah target yaitu sebesar 38,6%, dan capaian ini masuk kategori “Kurang”. Capaian kinerja ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 25,6 %.

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi tidak dapat mencapai target disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

- a) Informasi tentang pelayanan atau pemeriksaan hipertensi di dokter atau klinik swasta belum terintegrasi dengan Dinas Kesehatan.
- b) Kurangnya kesadaran penduduk yang berusia diatas 15 tahun untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah.
- c) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari tekanan darah tinggi.

Gambar 3.7. Pelayanan Pengukuran Tekanan Darah Masyarakat

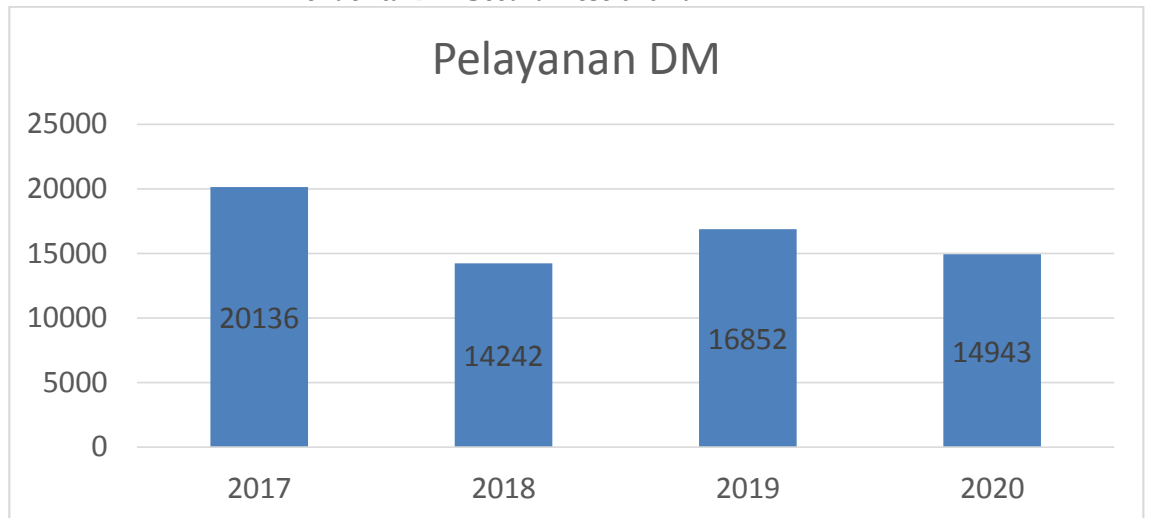


9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Capaian kinerja pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus pada tahun 2021 tidak mencapai target yaitu sebesar 70,39%, capaian ini masuk kategori “Cukup”, dan capaian kinerja ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 72,6 %.

Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.4. Perbandingan Jumlah Penderita DM Yang Dilayani Kesehatan Dengan Total Penderita DM Secara Keseluruhan



Gambar 3.8. Pelayanan Pengukuran Gula Darah

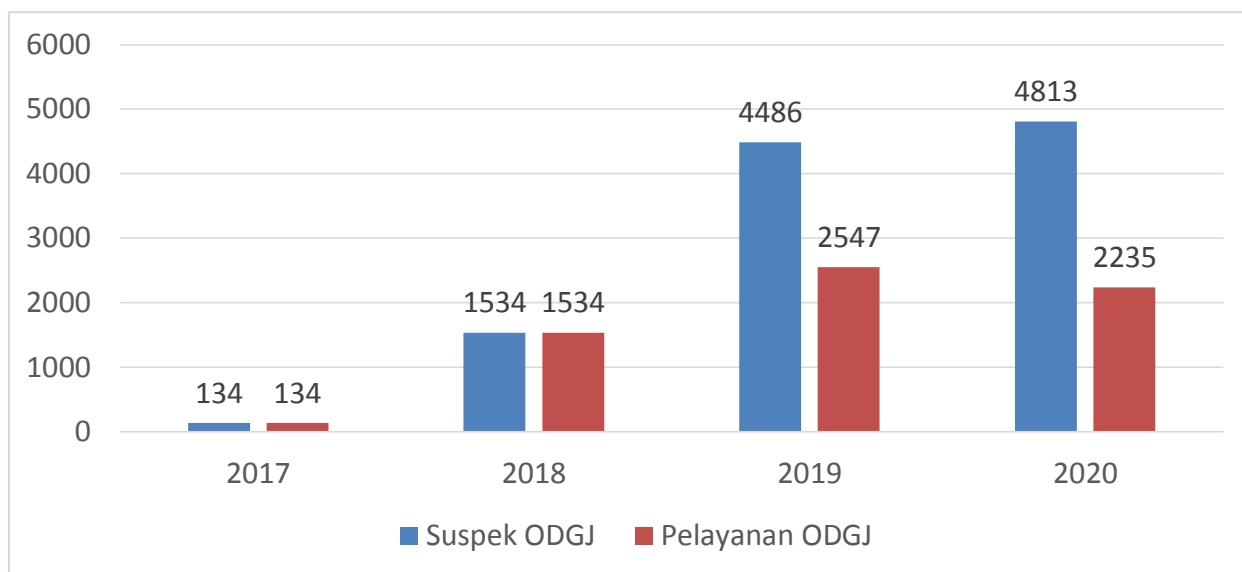


10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Capaian kinerja pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat pada tahun 2021 masih di bawah target yaitu sebesar 52,85 %, dan capaian ini masuk kategori “Kurang”. Capaian pada tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 46,4%.

Perbandingan antara suspek ODGJ dengan pelayanan kesehatan ODGJ dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.5. Perbandingan Pelayanan Kesehatan ODGJ dengan Jumlah Total ODGJ Di Kabupaten Brebes



Tidak tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

- Rendahnya skrining gangguan jiwa di masyarakat.
- Masih minimnya kelompok masyarakat peduli jiwa (kader jiwa)
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gangguan jiwa menjadi faktor penyebab dominan.

Gambar 3.9. Pemeriksaan dan Kunjungan Ke Rumah Orang Gangguan Jiwa Yang Dipasung



11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB

Capaian kinerja pelayanan kesehatan orang dengan TB pada tahun 2021 di bawah target yaitu sebesar 39,8%, capaian

ini dikategorikan “Kurang”, dan capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 47,3 %.

Salah satu penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan orang dengan TB adalah angka keberhasilan pengobatan TB. Bila melihat perkembangan pelayanan kesehatan orang dengan TB di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.6. Angka Keberhasilan Pengobatan TB



Tidak tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan TB disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

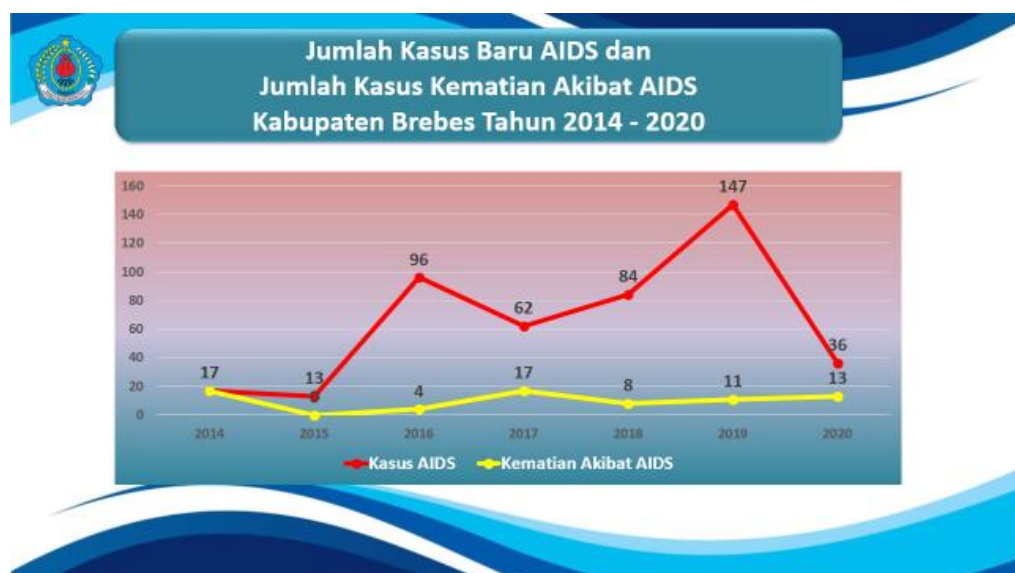
- Pemeriksaan kasus TBC di Puskesmas mengalami kendala karena keterbatasan SDM.
- Masyarakat merasa sehat sehingga tidak mau melakukan pemeriksaan dahak meskipun orang tersebut termasuk dalam suspek TB.
- Dahak sulit keluar saat dilakukan pemeriksaan.
- Kader sulit membujuk masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dahak jika tidak didampingi petugas.
- Tidak semua terduga TB dilaporkan melalui sistem informasi tuberculosis (SITT).

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

Capaian kinerja pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV pada tahun 2021 telah mencapai target yaitu sebesar 88,85%, dan masuk kategori “Baik”. Capaian tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 98,5 %.

Salah satu penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah penemuan orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Bila melihat perkembangan penemuan orang yang terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.7. Jumlah Kasus HIV, AIDS dan Kematian Akibat AIDS Di Kabupaten Brebes



Gambar 3.10. Penyuluhan Tentang HIV/AIDS dan Tes VCT

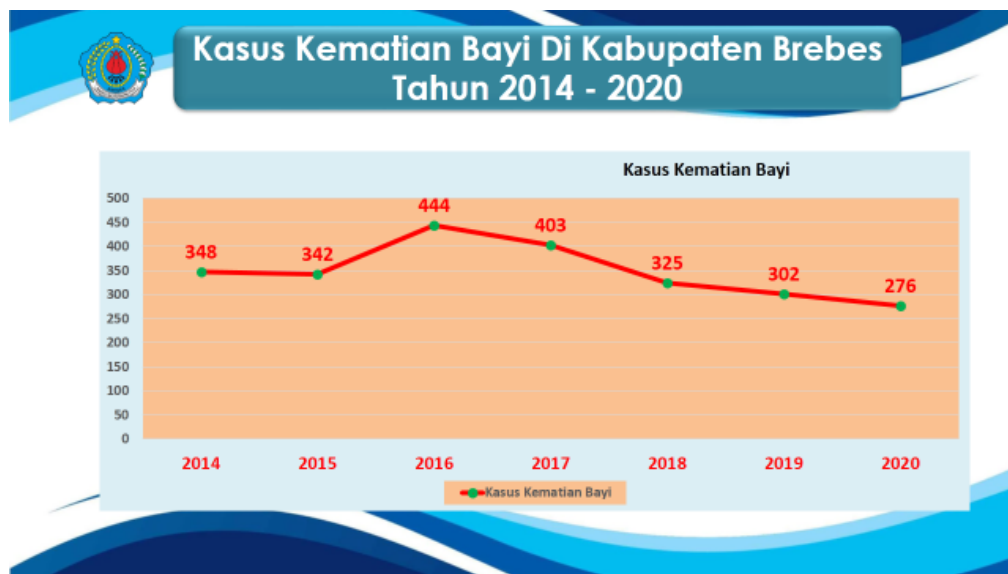


13. Angka Kematian Bayi / 100.000 KLH

Capaian kinerja tentang angka kematian bayi pada tahun 2021 telah melampaui target yaitu sebesar 32,6 % dan masuk kategori “Kurang”. Capaian tahun 2021 lebih rendah dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 120,8 %

Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.8. Angka Kematian Bayi

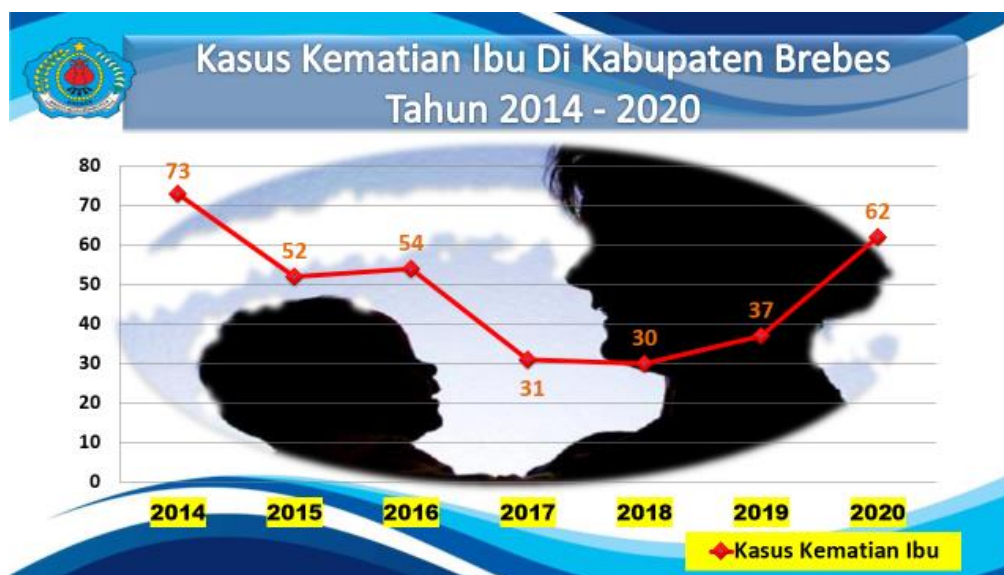


14. Kasus Kematian Ibu

Capaian kinerja tentang kasus kematian ibu pada tahun 2020 di bawah target yaitu sebesar 0 % dan dikategorikan “Kurang”. Capaian kinerja pada tahun 2020 jauh lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 119,4 %.

Perkembangan kasus kematian ibu di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.9. Kasus Kematian Ibu



Tidak tercapainya target kinerja tentang kematian ibu disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

- Kepatuhan petugas tentang SOP penanganan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu pasca salin.
- Penanganan bumil resti oleh nakes belum dilakukan secara optimal.
- Belum optimalnya sistem umpan balik ibu nifas pulang dari rumah sakit.
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam pendampingan ibu hamil.
- Belum optimalnya peran rumah sakit dalam menyikapi rujukan kasus gawat darurat.

MISI II : Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Sasaran Strategis 2.1
Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik

Sasaran Strategis “Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik” sebagaimana tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022, bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Jalan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	104,41	81	77.71	95.94	82

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian untuk sasaran 2.1 : Persentase Jalan Kabupaten kondisi baik tahun 2021 adalah 77,71 angka tersebut diperoleh dari panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik per jumlah panjang jalan kabupaten. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jalan Kabupaten dalam kondisi baik} = \frac{497,972}{540,732} \times 100 = 77,71$$

Capaian tahun 2021 menunjukan angka 95.94%, capaian ini turun dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 104,41% Sedangkan target akhir Jalan Kabupaten kondisi baik menurut RENSTRA 2017-2022 adalah 82, capaian indikator ini perlu ditingkatkan lagi karena

belum 100% kondisinya baik, artinya masih ada jalan kabupaten yang kondisi rusak.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2.1, adalah sebesar Rp. 90.170.922.761,- dengan realisasi Rp. 88.459.698.800,- (98,10%) yaitu jumlah total anggaran untuk penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten baik yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu :

Program dan Kegiatan untuk pencapaian Sasaran 1 antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Jalan

1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;

Gambar 3.11. Peningkatan Jalan Jl. Kretek - Kaligua



Grafik 3.10. Capaian Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Mantap



Sasaran Strategis 2.2 Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat

Sasaran Strategis Meningkatkan cakupan air minum layak untuk masyarakat mempunyai 1 Indikator yaitu Cakupan Akses Air Bersih

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Cakupan Akses Air Bersih

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Cakupan Akses Air Bersih	%	106.58	89.95	95.74	106.44	90.35

Capaian realisasi cakupan akses air bersih diperoleh dari jumlah penduduk mempunyai akses air minum layak per jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kab. Brebes yang telah mendapat akses air bersih mencapai 1.737.623 jiwa dari jumlah total penduduk 1.815.000 jiwa. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Akses Air Bersih} = \frac{1.737.623}{1.815.000} \times 100 = 95,74$$

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk realisasi capaian Sasaran 2.2 **Persentase cakupan akses Air Bersih** adalah 95,74% angka ini sudah melampaui target yang ditentukan di tahun 2021 yaitu 89,95%, tetapi angka capaian ini turun dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 0,14%.

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Brebes bersama OPD lain yang tergabung dalam tim Pokja AMPL (Air minum dan Penyehatan Lingkungan) adalah salah satu perangkat daerah yang ikut dalam mewujudkan semua masyarakat untuk mendapat akses air bersih layak khususnya dalam membangun sarana dan prasarana air bersih perpipaan, sedangkan untuk yang non perpipaan diampu oleh OPD lain. Untuk jaringan air bersih perpipaan juga bekerja sama dengan PDAM dan PAMSIMAS.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2.2 Cakupan Akses Air Bersih, adalah sebesar Rp. 18.077.715.000,- dengan realisasi Rp. 17.729.972.044,- (98,08%). Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian Sasaran 2.2 Persentase Akses Air Bersih adalah :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- 1.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

**Gambar 3.12. Pembangunan Tambahan Mata Air di Desa Kutayu
Kec.Tonjong**



Grafik 3.11. Capaian Akses Air Bersih Masyarakat



Sasaran Strategis 2.3 Meningkatnya Cakupan Sanitasi

Sasaran Strategis Meningkatkan cakupan sanitasi mempunyai 3 (tiga) Indikator yaitu Cakupan akses jamban, Persentase kawasan bebas banjir perkotaan, Persentase penanganan persampahan.

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Meningkatnya Cakupan Sanitasi

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Cakupan akses jamban	%	151.88	74.35	100	134.68	75.74
Kawasan bebas banjir perkotaan	%	98.96	98	94.29	96.21	100
Penanganan persampahan	%	70.76	28.66	18.04	62.94	32.66
Rata-rata		107,2			97.95	

Nilai cakupan akses jamban diperoleh dari jumlah rumah tinggal berakses jamban per jumlah rumah tinggal. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cakupan akses jamban} = \frac{3.126}{3.126} \times 100 = 100$$

Nilai Kawasan bebas banjir perkotaan diperoleh dari jumlah jumlah lokasi bebas genangan per jumlah lokasi rawan banjir. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kawasan bebas banjir perkotaan} = \frac{33}{35} \times 100 = 94,29$$

Nilai penanganan persampahan diperoleh dari jumlah sampah yang tertangani per total jumlah sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten

Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{penanganan persampahan} = \frac{172,17}{954,16} \times 100 = 18,04$$

Secara Garis besar, Capaian Kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Cakupan Sanitasi dilihat dari rata-rata capaian indikator kinerjanya adalah dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk persentase cakupan akses jamban tercapai 134.68% Kegiatan Jambanisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Brebes Tahun anggaran 2021 bersumber dari Dana DAK dan DAU dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dalam Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dengan total anggaran Rp. 7.625.000.000 (DAK) untuk melayani 1.077 Kepala Keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan di 6 Kecamatan yaitu : Salem, Bumiayu, Tonjong, Losari, Bulakamba dan Tanjung.
2. Kegiatan Penataan. dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha. Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan total Anggaran Rp. 4.190.000.000 (DAU) dengan jumlah 2.055 Unit. Kegiatan ini dilaksanakan di 14 Kecamatan yaitu Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Tonjong, Paguyangan, Banjarharjo, Ketanggungan, Larangan, Losari, Tanjung, Bulakamba, Jatibarang, Wanasari, dan Brebes.

Dalam hal persentase kawasan bebas genangan dari air hujan tercapai 94,29% karena di tahun 2021 masih terdapat satu titik banjir di wilayah kota brebes.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Brebes adalah disamping meningkatkan kondisi saluran drainase juga pemeliharaan saluran drainase yang mengalami kerusakan serta membentuk tim “Dalban” atau Pengendali Banjir yaitu tim yang selalu siap siaga jika hujan deras dan terjadi genangan di kawasan kota Brebes akan segera bertindak untuk menanganinya.

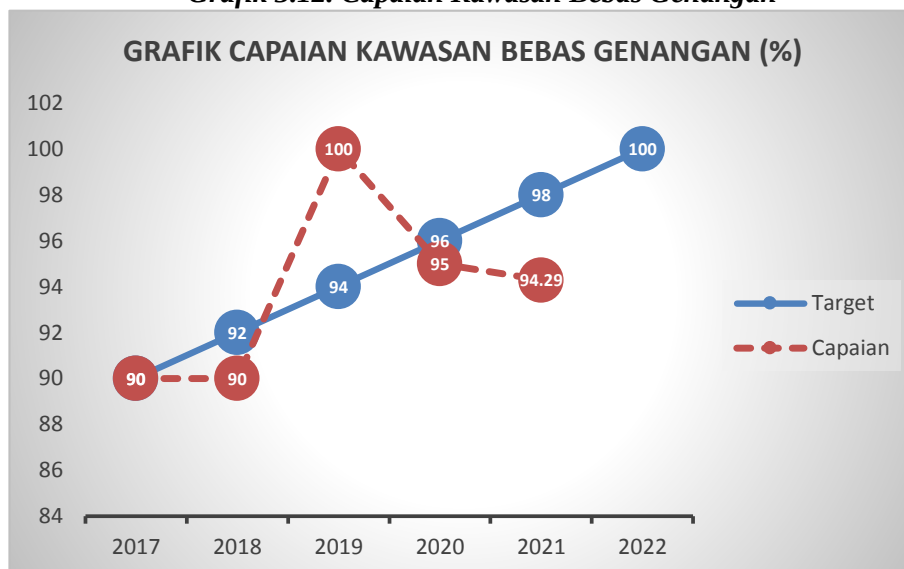
Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian Sasaran 2.3, Persentase kawasan bebas genangan, yaitu :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - 1.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Gambar 3.13. Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Brebes



Grafik 3.12. Capaian Kawasan Bebas Genangan



Peningkatan Pengelolaan Sampah dengan indikator Persentase penanganan persampahan dan target untuk Tahun 2021 sebesar 28,66, telah terealisasi sebesar 18.04 % atau sebesar 62.94% untuk pencapaian kinerjanya, dikategorikan Sedang.

Pencapaian kinerja untuk pengelolaan sampah masih belum mencapai target karena :

- a. Terbatasnya armada pengangkut sampah dan tenaga kerja, kondisi Tahun 2021 jumlah Truk 24 unit dan tenaga kerja 253 orang;
- b. Adanya pengurangan anggaran dibidang pengelolaan sampah sehingga mengurangi jadwal pengambilan sampah, yang tadinya 3 shift menjadi 2 shift;
- c. Alat berat yang berjumlah 2 unit mengalami kerusakan 1 unit, sudah dibetulkan tetapi belum maksimal sehingga belum dapat difungsikan seperti semula;
- d. Perbandingan jumlah sampah yang dihasilkan dalam satu tahun sesuai perhitungan :
 - Timbulan sampah berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2021 sebesar $\pm$ 950 ton/hari, sedangkan sampah yang dapat terangkut ke TPA baru sebesar $\pm$ 239,4 Ton/hari dan yang dikelola masyarakat sebesar + 190 ton/hari, berarti masih ada sisa sampah yang belum terangkut + 520.6 ton/hari.

- Kondisi ideal untuk dapat mengatasi seluruh permasalahan sampah di Kabupaten Brebes diperlukan armada sekitar 150 truk dan 900 orang tenaga pengelola sampah.

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes pada tahun 2021 dalam hal penanganan sampah yaitu “PERINGATAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL (HPSN) TAHUN 2021 ” yang dilaksanakan pada tanggal 03 mei 2021. Kegiatan meliputi bersih-bersih sampah di Desa Kaligangsa Wetan.

Secara umum capaian indikator pada seluruh sasaran diatas pada Tahun 2021 dapat dicapai sesuai target (Tinggi) atau 97.95%.

Sasaran Strategis 2.4 **Meningkatnya Cakupan Irigasi dalam Kondisi Baik**

Sasaran Strategis Meningkatkan cakupan irigasi dalam kondisi baik mempunyai 1 (satu) Indikator yaitu Rasio jaringan irigasi baik.

Tabel 3.13. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Irigasi dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Rasio jaringan irigasi baik	%	115.76	64.04	74,08	115.68	65.04

Nilai rasio jaringan irigasi baik diperoleh dari Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik per jumlah panjang saluran irigasi. Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio jaringan irigasi baik} = \frac{39.259}{52.996} \times 100 = 74,08$$

Capaian dari Sasaran Strategis Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik, dapat dicapai yaitu sebesar 115,68 atau tercapai dengan kategori **Sangat Berhasil** dan melampaui target yang ditetapkan. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya dengan :

- a. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang ada
- b. Jumlah aparatur, dan masyarakat petani yang mandiri dan berwawasan dalam pengelolaan jaringan irigasi dan air baku
- c. Prosentase panjang sungai/saluran pembuang yang berfungsi optimal

Pada tahun 2021 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes menetapkan sasaran strategisnya berupa terpenuhinya kebutuhan air irigasi bagi areal sawah dan meningkatkan pengamanan kawasan areal pertanian dari bahaya banjir yang disebabkan oleh aliran sungai dengan indikator persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang ada, target Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang ada sebesar 64.04% dan di akhir tahun 2021 realisasinya sebesar 74% atau sebesar 115.55 % dari target.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja sasaran diatas adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan yang meliputi :

- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- b. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Sasaran Strategis 2.5 Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat

Sasaran Strategis Meningkatkan penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat mempunyai 1 (satu) Indikator yaitu Rasio rumah layak huni.

Tabel 3.14. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Rasio Rumah Layak Huni	%	115.50	87.41	99.76	114.13	88.24

Nilai rasio rumah layak huni diperoleh dari jumlah rumah layak huni per jumlah rumah tinggal. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio rumah layak huni} = \frac{819}{821} \times 100 = 99,76$$

Angka realisasi diatas didapat dari jumlah realisasi rumah tidak layak huni yang tertangani di Kabupaten Brebes tahun 2021 sejumlah 819 unit rumah dibanding dengan target meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat yang berjumlah 821 unit. Sehingga rumus diatas didapat data realisasi kinerja untuk Rasio rumah layak huni sebesar 99,76%.

Standar yang digunakan dalam Sasaran 1 ini adalah UU Nomor I Tahun 2011 Tentang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes telah melaksanakan intervensi terhadap rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2021 sebanyak 14.394 unit, dan untuk keberhasilan capaian indikator sasaran 1 didukung oleh adanya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, APBD, CSR dan Dana Desa.

Faktor – faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya capaian indikator tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal(Kewenangan OPD) diantaranya pendanaan APBD kabupaten yang masih terbatas, terbatasnya tanah milik Pemda, belum adanya dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP), data jumlah rumah yang tidak valid, banyaknya perumahan yang fasum dan fasosnya yang belum berterimakan pada Pemda, dan untuk faktor eksternal (Kewenangan diluar OPD) yaitu harga tanah yang mahal, tingginya angka kemiskinan di kabupaten brebes, akses masyarakat yang terbatas terhadap pembayaran perumahan, serta banyaknya RTLH yang harus ditangani.

Pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak terlepas dari dukungan sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi dibedakan menjadi tiga yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta anggaran. Khusus untuk anggaran akan dibahas dalam akuntabilitas keuangan.

Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang tersedia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Begitu pula kinerja organisasi dalam peningkatan rumah layak huni untuk masyarakat.

Program dan Kegiatan untuk pencapaian Sasaran 2.5 antara lain :

1. Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

- Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 - Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

Sasaran Strategis 2.6
Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh

Sasaran Strategis Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh memiliki 1 (satu) Indikator yaitu Persentase permukiman kumuh.

Tabel 3.15. Menurunnya Kawasan Lingkungan Pemukiman Kumuh

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Permukiman Kumuh	%	80.09	18.64	38.25	-5.20	0

Nilai persentase permukiman kumuh diperoleh dari Luas kawasan permukiman kumuh per luas area permukiman keseluruhan. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase permukiman kumuh} = 100\% - \frac{69,02}{106,59} = 38,25$$

Capaian dari Sasaran Strategis Persentase Permukiman Kumuh dapat dicapai yaitu sebesar -5.20, Tidak tercapainya sasaran ke 2.6 ini dikarenakan intervensi yang dilaksanakan di lokus Non KOTAKU hanya menurunkan bobot kekumuhan tetapi tidak mengurangi luasan kawasan kumuh dilokus tersebut.

Permen PUPR Nomor 2/PRT/2016 menyebutkan bahwa dilingkungan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terdapat tujuh aspek kekumuhan, yaitu Kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum / air bersih, sanitasi layak, pengelolaan sampah, dan pengamanan bahaya kebakaran.

Standar yang digunakan dalam Sasaran 2 adalah UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Permen PUPR Nomor 2/PRT/2016

Faktor – faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya capaian indikator tersebut yaitu internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal (Kewenangan OPD) yaitu keterbatasan kewenangan

OPD dalam menangani kawasan permukiman kumuh yang ada di pedesaan dan untuk faktor eksternal (Kewenangan diluar OPD) yaitu penentuan lokasi kegiatan tidak sepenuhnya ditentukan oleh OPD.

Pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak terlepas dari dukungan sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi dibedakan menjadi tiga yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta anggaran. Khusus untuk anggaran akan dibahas dalam akuntabilitas keuangan.

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang tersedia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Begitu pula kinerja organisasi dalam menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh dalam (Program KOTAKU) seluas 207,45 Ha menjadi 34,4 Ha.

Sasaran Strategis 2.7 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup memiliki Indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; sedangkan indeks kualitas lingkungan hidup terdiri ditentukan dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan.

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						
- Indeks Kualitas Air (pencemaran air)	Ha	82.64	47.6	50	105.04	49
- Indeks Kualitas Udara (pencemaran udara)	Ha	99.42	84.4	81.07	96.05	85.70

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
- Indeks Tutupan Lahan (lahan kritis yang tertangani)	Ha	99.25	68.5	47.35	69.12	69.00
Rata-rata		93.77			90.07	

Nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu dan standard yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah sedangkan penghitungan lahan menggunakan standard luas kawasan hutan di setiap provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Data capaian indikator indeks lingkungan hidup diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes yang didapatkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Pengukuran kinerja sasaran strategis diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurunnya pencemaran air dengan indikator Indeks Kualitas Air dimana target renstra tahun 2021 adalah 47,6 dan tercapai IKA 50 dengan prosentase capaian sebesar 105,04%. Dengan hasil pencapaian tersebut masuk dalam kategori Sangat Tinggi.
2. Menurunnya pencemaran udara yang didukung Indeks Kualias Udara dengan target 84,4. Untuk Tahun 2021 dari target tersebut tercapai 81,07 dengan prosentase pencapaian mencapai 96,05 % dengan kategori Sangat Tinggi.
3. Pengurangan lahan kritis, Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk mencapai sasaran tersebut dengan target pada Tahun 2021 sebesar 66 dan dapat tercapai 47.35. Prosentase pencapaian sebesar 71,74 % dengan kategori Sedang.

Pencapaian kinerja untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih belum mencapai target karena :

- a. Pengukuran Luasan Tutupan Lahan memakai Citra Satelit, dimana yang dapat terekam adalah pohon dengan ketinggian

6m dan tidak terputus, sehingga untuk pohon hasil penanaman yang belum mencapai ketinggian 6m belum dapat terekam dan masuk dalam kategori tutupan lahan.

Secara umum, capaian indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 dapat dicapai 90.07 dengan kategori Tinggi.

Misi III : Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.

Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian

Sasaran Strategis Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian memiliki 1 (satu) Indikator yaitu Kontribusi sektor pertanian.

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Kontribusi Sektor Pertanian	Rupiah (miliar)	88.85	21,219.108	17,877.527	84.25	22,704.445

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, produk domestik bruto (PDB) lapangan usaha pertanian atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 17,877 miliar sepanjang 2021.

Dari tabel diatas disampaikan bahwa capaian indikator kinerja sudah mencapai target yang dapat dikategorikan berhasil. Jika dibandingkan tahun 2020 prosentase capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -4,6%. Pada dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Brebes pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan tiga indikator utama sebagai tolok ukur. Adapun pengukuran ke tiga indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Indikator Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Th. 2020
1.	Meningkatkan Produksi Produk Pertanian Utama:					
	a. Padi	Ton	615.703	618.913	100,52	98,59
	b. Jagung	Ton	143.541	187.015	130,29	119,34
	c. Bawang merah	Ton	307.506	374.548	121,80	131,86
2.	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat:					
	a. Skor Pola Pangan Harapan (Susenas)	Nilai	76	84,93	111,75	116,21
	b. Skor Pola Pangan Harapan (Reguler)	Nilai	88,2	78,48	88,98	87,97

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Peningkatan Produksi Produk Pertanian Utama, dari 3 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian masuk kategori amat baik. Sedangkan untuk pengukuran kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, 1 indikator masuk kategori amat baik dan 1 indikator masuk kategori baik. Kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Produksi Produk Pertanian Utama komoditas padi, jagung dan bawang merah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produksi padi tahun 2021 sebesar 618.913 ton atau terealisasi sebesar 100,52% dari target Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Renstra tahun 2021 sebesar 615.703 ton. Pencapaian tahun 2021 dibanding tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,93% (produksi padi tahun 2020 sebesar 602.920 ton dengan capaian 98,59%), sedangkan produksinya

meningkat sebesar 2,65%. Meningkatnya produksi padi dengan nilai diatas target dalam renstra untuk tahun 2021, dipengaruhi beberapa faktor antara lain ketersediaan air tercukupi dibanding tahun sebelumnya, serangan OPT relatif lebih sedikit, kenaikan luas panen dan tersedianya sarana dan prasarana.

2. Produksi jagung tahun 2021 sebesar 187.015 ton atau terealisasi sebesar 130,29 % dari target Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Renstra tahun 2021 sebesar 143.541 ton. Pencapaian tahun 2021 dibanding tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,94 % (produksi tahun 2020 sebesar 167.978 ton dengan capaian 119,34 %) sedangkan kenaikan produksinya sebesar 19.037 ton atau naik 11,3 %. Kenaikan produksi jagung tahun 2021 disebabkan :
 - a. Adanya bantuan benih jagung hibrida pada lahan-lahan pertanian bukan sawah/ladang
 - b. Produktivitas mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, dari 65,21 kuintal/ha menjadi sebesar 73,03 kuintal/ha hal ini juga disebabkan karena penggunaan benih jagung hibrida.
3. Produksi Bawang merah tahun 2021 sebesar 374.548 ton atau terealisasi sebesar 121,80% dari target dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2021 sebesar 307.506 ton, pencapaian tahun 2021 dibanding tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,31 % (produksi bawang merah tahun 2020 sebesar 395.571 ton capaiannya 131,86 %). Penurunan produksi dibanding tahun tahun 2021 disebabkan luas panen di beberapa kecamatan mengalami penurunan sehingga besaran produksinya juga menurun. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan ini antara lain yaitu pada tahun 2020 produksi sangat tinggi karena pada akhir tahun 2019 panen mundur, yaitu di awal tahun 2020 sehingga menambah angka produksi di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021, curah hujan normal sehingga panen waktu panen tidak berubah sehingga produksi tidak sebesar tahun 2020.

Dalam hal perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Brebes telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, yakni Kontribusi Sektor Perikanan. Secara umum capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Perikanan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%) Capaian 2021	(%) Capaian Th. 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Ton)	3.591,00	3.675,47	102,35	111,90
	Produksi Perikanan Tangkap di Waduk (Ton)	135,00	203,22	150,53	245,73
	Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (Ton)	71.407,00	71.987,79	100,81	101,72
	Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Ton)	3.189,00	3.289,90	103,16	82,03
	Produksi Garam Tambak/ Krosok (Ton)	60.000,00	1.458,72	2,43	4,08

Secara umum capaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan** dapat tercapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja **Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan** diukur dari lima indikator, yaitu:

- Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Ton),
- Produksi Perikanan Tangkap di Waduk (Ton),
- Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (Ton),
- Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Ton),
- Produksi Garam Tambak/Krosok (Ton).

Dari lima indikator kinerja tersebut, empat diantaranya tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yang tidak tercapai adalah Produksi Garam Tambak/Krosok.

Penyebab belum tercapainya produksi garam tambak/krosok adalah faktor cuaca karena pada tahun 2021 bisa dikatakan musim kemarau basah yang mana intensitas cahaya matahari belum maksimal untuk bisa memproduksi garam dalam jumlah yang banyak dan dengan kualitas yang baik, selain itu juga jumlah petambak garam pun berkurang.

Sedangkan untuk produksi perikanan budidaya Air Tawar yang pada tahun 2020 belum bisa mencapai target, untuk tahun 2021 ini bisa melampaui target yang sudah ditetapkan.

Capaian kinerja pada sasaran, rata-rata capaian kinerja Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020, mengalami **penurunan**, karena untuk tahun 2021 rata-rata tercapai **91,86%** sedangkan tahun 2020 tercapai **109,09%**.

Dalam hal peternakan terdapat sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Brebes. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran yang dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.20. Capaian Indikator Kinerja Sektor Peternakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Rp. juta)	Capaian (Rp. juta)	% Capaian
Peningkatan Produktivitas Peternakan	Kontribusi sektor peternakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/Rp. Juta	687.000	1.091.302	159

Sasaran umum capaian sebagian besar indikator pada Untuk capaian sasaran kinerja meningkatnya produktivitas peternakan diukur dari jumlah kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto yang dicapai selama tahun 2021. Secara umum realisasi pada tahun 2021 telah melampaui target yang di tetapkan yaitu sebesar Rp. 1.091.301 juta dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 687.000 juta. Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis pada tabel 1.4 telah melebihi dari target dengan persentase capaian 159% dan ini merupakan capaian Kinerja “Sangat Baik”.

Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Sasaran Strategis Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan memiliki 1 (satu) Indikator yaitu Kontribusi sektor industri pengolahan. Didalamnya didukung oleh meningkatnya sektor industri kecil dan menengah. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Industri

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Kontribusi Sektor Industri	Rupiah (miliar)	130.68	6,198.153	8,588.388	138.56	6,333.09

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, produk domestik bruto (PDB) lapangan usaha industri atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 8,588 miliar sepanjang 2021.

Dari tabel diatas disampaikan bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan dan dikategorikan sangat berhasil. Jika dibandingkan tahun 2020 prosentase capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 7,88%. Kenaikan capaian dikarenakan mulai banyaknya investasi yang ada di Kabupaten Brebes. Selain itu, adanya langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan izin usaha bagi industri kecil dan menengah;
2. Memberikan pembinaan bagi industri kecil dan menengah dalam memperkuat kluster industri dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan, serta magang bagi para pelaku IKM di

beberapa daerah yang mempunyai keunggulan atas sebuah produk IKM.

3. Memberikan fasilitasi kemitraan kerjasama bagi industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta;
4. Membantu industri kecil dan menengah dalam pengujian laboratorium atas produk yang dihasilkannya sehingga memenuhi standar yang dipersyaratkan bagi produk yang bersangkutan. Selain itu juga memberikan kemudahan untuk mendapatkan HAKI, Label Halal, PiRT.

Sasaran Strategis 3.3 **Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan**

Pada sasaran strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan, memiliki Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan. Sektor Perdagangan mempengaruhi pembangunan daerah dalam hal perekonomian dan diharapkan dapat mempengaruhi laju inflasi yang tentunya masih sesuai target pembangunan, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Kontribusi Sektor Perdagangan	Rupiah (miliar)	121,93	6,271.182	7,904.441	126.04	6,336.182

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, produk domestik bruto (PDB) lapangan usaha perdagangan atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 7,904 miliar sepanjang 2021.

Dari tabel diatas, menggambarkan bahwa capaian kinerja sektor perdagangan dapat tercapai dan melampaui target yang telah

ditetapkan. Jika dibandingkan tahun 2020 prosentase capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,11%. Hal tersebut merupakan salah satu imbas dari meningkatnya investasi yang masuk di Kabupaten Brebes, sehingga sektor perdagangan juga dapat tumbuh/berkembang. Nilai Retribusi dari Sektor pasar belum melampaui target, dari target 2021 sebesar Rp. 5.875.000.000,-, tetapi pada akhir tahun 2021, jumlah seluruh Retribusi telah mencapai Rp. 5.476.469.400,-. Realisasi yang belum mencapai target karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya penutupan pasar pada beberapa waktu pada tahun 2021. Tetapi untuk terus meningkatkan retribusi dari sektor pasar Dinkopumdag secara intensif melakukan cek potensi pasar, dan melakukan kegiatan pembinaan bagi para pengelola Pasar maupun para pedagang agar tertib dalam mengelola Pasar dan tercipta suasana kondusif dalam proses perdagangan sehingga mampu meningkatkan volume transaksi perdagangan di Pasar. Peningkatan Volume transaksi ini tentunya akan meningkatkan penerimaan retribusi.

Sasaran Strategis 3.4 **Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata**

Pada sasaran strategis Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata, memiliki Indikator Kinerja yaitu Kontribusi sektor pariwisata.

Tabel 3.23. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Kontribusi Sektor Pariwisata	Rupiah (miliar)	43.38	2,592.318	992.869	38.30	2,851.55

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, produk domestik bruto (PDB) lapangan usaha pariwisata atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 992,869 juta sepanjang 2021.

Dari tabel diatas, menggambarkan bahwa capaian kinerja sektor pariwisata tergolong rendah di dibandingkan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan tahun 2020 prosentase capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -5,08%. Hal tersebut merupakan salah satu imbas dari meningkatnya adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya wisatawan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan penyatuan program yang saling mengisi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Belum lengkapnya sarana dan prasarana wisata yang menyangkut Destinasi / Pengembangan pembangunan, penghijauan lokasi obyek wisata, mainan anak-anak dan remaja, akan ditingkatkan secara bertahap;
2. Rendahnya sumber daya manusia (SDM) dibidang kepariwisataan, akan ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan diklat pariwisata;
3. Sektor transportasi menuju obyek wisata, ditingkatkan dengan melakukan kerja sama dengan instalasi terkait dan para pengusaha lokal sekitar obyek untuk mengusahakan angkutan (angkot);
4. Obyek wisata yang status kepemilikan tanahnya bukan milik pemda agar statusnya dapat di ubah menjadi milik pemda Kabupaten Brebes;
5. Lemahnya hubungan kerjasama kelembagaan antar wilayah pemerintah dan stakeholders kepariwisataan akan ditingkatkan;
6. Kegiatan promosi dan informasi kepariwisataan akan lebih ditingkatkan;

7. Adanya tatanan new normal pada pelaksanaan kegiatan kepariwisataan yang selalu memprioritaskan pencegahan penyebaran virus covid 19 dengan selalu menerapkan 5M.

Sasaran Strategis 3.5

Meningkatnya Laju Investasi Daerah Dengan Memperhatikan Ketersediaan Sumberdaya Alam, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Sasaran strategis Meningkatkan Laju Investasi Daerah Dengan Memperhatikan Ketersediaan Sumberdaya Alam, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan Hidup memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Laju kenaikan investasi dan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN).

Investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah yang dikenal sebagai PDRB, dua hal ini memiliki korelasi positif, jika investasi baik maka PDRB akan naik, begitu pula sebaliknya. Namun demikian investasi bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dengan ditetapkannya Kabupaten Brebes sebagai kawasan industri untuk menopang pertumbuhan nasional, kebijakan pusat tentu harus dibarengi dengan pelaksanaan teknis dan kebijakan daerah yang tepat salah satunya adalah dengan kemudahan izin investasi dan durasi perizinan yang cepat serta penataan ruang dengan penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai kepastian peruntukan lahan untuk investasi.

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Laju Investasi Daerah Dengan Memperhatikan Ketersediaan Sumber Daya Alam, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Laju kenaikan investasi	%	114.00	2	240,84	12.042%	2
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Rupiah (Milyar)	429.33	1.384	3.714	268,35%	1,411
Rata-rata		271,66			6.134,18%	

Nilai laju kenaikan investasi diperoleh melalui formulasi pengukuran dari laju pertumbuhan investasi berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes jumlah investasi tahun 2021 sebesar Rp. 3.714.401.652.097. nilai laju kenaikan investasi di peroleh dari pertumbuhan jumlah nilai investasi tahun 2021 di bandingkan dengan jumlah nilai investasi tahun 2020 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Laju kenaikan investasi} &= \frac{\text{Jml Investasi 2021} \times \text{Jml Investasi 2020}}{\text{Jml Investasi 2020}} \times 100 \\
 &= \frac{3.714,402 \times 1.089,787}{1.089,787} \times 100 = 240,84 \%
 \end{aligned}$$

Indikator Kinerja Utama DPMPSTSP adalah Meningkatnya Laju Investasi Daerah yang mana tahun 2021 menargetkan laju investasi sebesar 2% dan Nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) sebesar 1.384 Milyar. Indikator kinerja utama tersebut merupakan indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

a. Laju kenaikan investasi

Laju kenaikan investasi pada tahun 2021 sebesar 240,84%, atau terealisasi sebesar 12.042% dari target dalam Renstra Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 sebesar 2%.

b. Jumlah nilai investasi yang berskala nasional (PMA/PMDN)

Jumlah nilai investasi yang berskala nasional pada tahun 2021 sebesar 3.714 milyar rupiah, atau terealisasi sebesar 268,35% dari target dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 sebesar 1.384 milyar rupiah.

Dari hasil capaian tersebut Dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum DPMPTSP Kabupaten Brebes melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari realisasi tahun 2021 melebihi dari target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 3.6 Meningkatnya Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Pada sasaran strategis Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah, memiliki Indikator Kinerja yaitu Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan.

Tabel 3.25. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	%	66.67	80	80	100	100

Berdasarkan data dari Baperlitbangda Kabupaten Brebes tahun 2021 Capaian Kinerja Meningkatnya kebijakan hasil Kelitbangsan yang

diimplementasikan, yaitu Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan. Realisasi capaian kinerja tercapai 100, dengan predikat sangat baik. Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya di Kabupaten Brebes.

Sasaran Strategis 3.7 **Meningkatnya Angkatan Kerja yang Bekerja**

Sasaran strategis Meningkatkan Angkatan Kerja yang Bekerja, memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Tingkat partisipasi angkatan kerja dan Rasio penduduk yang bekerja.

Tabel 3.26. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Angkatan Kerja yang Bekerja

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	96.25	70.73	63.97	90.44	72.15
Rasio penduduk yang bekerja	%	94.11	66.15	60.1	90.85	67.47
Rata-rata		95,18			90.65	

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 63,97. BPS mendefinisikan TPAK sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Nilai TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan nilai Rasio Penduduk yang bekerja diperoleh dari Jumlah penduduk yang bekerja per jumlah penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio penduduk yang bekerja} = \frac{821.061}{1.366.087} \times 100 = 60,1$$

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Tingkat partisipasi angkatan kerja dan Rasio penduduk yang bekerja, dapat diketahui dari 2 (dua) indikator hampir seluruh capaian kinerja memenuhi target. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3.7, rata-rata mengalami **penurunan** dibanding Tahun 2020. Tahun 2021 tercapai 90,65%, sedangkan Tahun 2020 tercapai 95,18%. Walaupun terdapat

penurunan capaian kinerja, kondisi yang terjadi antara tahun 2020 dan 2021 hampir sama :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 sebesar 8,43 % sama dengan tahun 2020, walaupun mengalami penurunan kinerja namun selisih tidak mencapai 1 % sehingga dapat diartikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia kerja terdapat 7 orang yang selama seminggu terakhir tidak bekerja pada saat diadakan survey oleh Badan Pusat Statistik.
2. Tingkat Pengangguran terbuka tidak serta merta menunjukkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja karena penyerapan angkatan kerja dipengaruhi berbagai sektor yang mempengaruhi perekonomian.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja dengan mengoptimalkan peran Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di sekolah – sekolah Kejuruan dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
2. Memberikan fasilitasi/kemudahan bagi kepada para pencari kerja (khususnya yang akan bekerja ke luar negeri), melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).
4. Berupaya memperbanyak pelatihan berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan, dan berbasis masyarakat bagi para pencari kerja, baik melalui anggaran dari kementerian, pemerintah provinsi maupun dari anggaran pemerintah daerah.
5. Melakukan Pembinaan – Pembinaan kepada Perusahaan dan Pekerja agar terjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dan pekerja.

MISI IV : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah

Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, memiliki Indikator Kinerja yaitu Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat). Hal ini dapat menunjukkan kualitas pelayanan dari unit-unit penyelenggara pelayanan publik yang ada di pemerintah daerah kabupaten Brebes.

Tabel 3.27. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka (indeks)	102.41	79.39	80.38	101.25	77.98

Nilai survey kepuasan masyarakat di peroleh dari aplikasi e-Sim IKM <http://jenius.brebeskab.go.id/ikm/> dengan nilai yang sudah otomatis muncul setelah penginputan data pada aplikasi tersebut.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan di beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebesar 80,38 atau masuk kategori "Baik".

Pelayanan kepada masyarakat yang diberikan kepada masyarakat oleh Instansi Pemerintah di Kabupaten Brebes secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey dimana dari 96 Unit penyelenggara pelayanan (OPD dan

Puskesmas) yang melakukan survey, sebagian besar mempunyai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan predikat "Baik". Sedangkan Pelayanan Publik OPD yang dijabarkan pada Laporan ini yaitu 15 unit Pelayanan Publik rata — rata mendapatkan nilai dengan rentang nilai antara 79,78 sampai dengan 80,38.

Beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain :

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, diharapkan kepada Kepala Perangkat Daerah agar lebih memperhatikan unsur pelayanan yang berdasarkan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai nilai rendah.
2. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan maka perlu adanya komitmen semua pihak untuk lebih memperhatikan instansi pelayanan dengan memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) , khususnya yang bertugas di bidang pelayanan perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan baik melalui pembinaan oleh pimpinan maupun pengiriman diktat.
4. Sarana dan prasarana pelayanan perlu juga ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan Standar Pelayanan.
5. Survey IKM perlu dilakukan secara berkesinambungan secara periodik di tahun- tahun mendatang sehingga dengan berdasarkan hasil survey IKM tersebut instansi dapat melakukan perbaikan mutu pelayanan sesuai hasil penilaian masyarakat.

Sasaran Strategis 4.2

Membaiknya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sasaran strategis Membaiknya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Indeks Nilai LPPD; dan Opini BPK.

Tabel 3.28. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Membaiknya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Indeks LPPD	Indeks	100	Tinggi	-	-	Tinggi
Opini BPK		WTP	WTP	-	-	WTP

Nilai LPPD tahun 2021 masih menunggu hasil dari Kementerian Dalam Negeri. Opini BPK untuk tahun 2021 masih menunggu hasil audit BPK yang akan dikeluarkan dalam bulan Juni 2021.

Nilai Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah merupakan salahsatu indikator pada Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Penilaian Keuangan ini dilakukan oleh pihak eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan komponen penting untuk menilai sejauhmana penilaian yang obyektif terhadap akuntabilitas dan kinerja daerah dari aspek pengelolaan keuangannya.

Sasaran Strategis 4.3 Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Profesional dan Berkompeten

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25
- b. Kompetensi memiliki bobot 40
- c. Kinerja memiliki bobot 30
- d. Disiplin memiliki bobot 5

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 – 80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Profesional dan Berkompeten

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Profesionalitas ASN	Angka (indeks)	168.28	63.48	73.34	115.59	62.41

Berdasarkan data dari BKPSDMD Kabupaten Brebes indikator tersebut didapatkan melalui rata rata nilai dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Kualifikasi memiliki nilai rata-rata 12,69
- b. Kompetensi memiliki nilai rata-rata 30,66
- c. Kinerja memiliki nilai rata-rata 25
- d. Disiplin memiliki nilai rata-rata 4,99

Sehingga total nilai rata-rata dari dimensi tersebut yaitu 73,34. Berdasarkan data diatas, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara pada tahun 2021 telah melampaui dari target sebesar 63,48 dicapai 73,34 (kategori sedang) sehingga mendapatkan persentase capaian 115,59 dengan kategori **Sangat Baik**.

Sasaran Strategis 4.4 Meningkatnya Kualitas Kelitbangan

Pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Kelitbangan, memiliki Indikator Kinerja yaitu Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 3.30. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Kelitbangan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah	%	166.67	100	100	100	100

Nilai persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah diperoleh dari Rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan per rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang diusulkan. Berdasarkan data dari bapperlitbangda Kabupaten Brebes terlaksananya target kegiatan setiap tahun dengan hasil berupa laporan hasil penelitian yang di dalam nya ada rekomendasi. Ada 3 laporan hasil penelitian yang yang dimanfaatkan diantaranya adalah laporan hasil penelitian tentang Stunting, laporan hasil penelitian tentang Geopark Bumiayu, laporan hasil penelitian tentang Kebun Raya Maribaya.

Capaian Kinerja Meningkatnya kebijakan hasil Kelitbangan yang diimplementasikan, yaitu Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan. Realisasi capaian kinerja tercapai 100, dengan predikat baik. Capain kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, hal ini dikarenakan target indikator kinerja pada tahun 2020 hanya sebesar 60%.

Pemerintah Kabupaten Brebes harus bisa merumuskan kebijakan yang berkualitas sebagai solusi atas berbagai masalah. Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas tersebut, diperlukan data dan informasi yang valid dan faktual, dan analisis yang akurat. Suatu rencana dan penataan program harus didahului oleh kegiatan penelitian dan pengkajian agar lebih terjamin validitas dan data, serta dapat mengurangi pemborosan yang merupakan akibat kegiatan perencanaan dan program yang kurang optimal. Peran dan pengembangan dalam Pemerintahan Daerah menjadi bagian penting, agar kebijakan di pemerintah daerah baik dalam bentuk program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat, lebih terfokus dan teliti, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan.

Oleh karena itu, hasil kelitbangan harus solutif terhadap masalah yang berkembang, dan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan di Pemerintah Daerah, baik dalam

perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, serta harus mampu meningkatkan kinerja program di daerah.

Sasaran Strategis 4.5
Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, dan Keindahan
Serta Kenyamanan Lingkungan Masyarakat

Sasaran strategis Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan keindahan serta kenyamanan lingkungan masyarakat, memiliki Indikator Kinerja yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan).

Tabel 3.31. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan keindahan serta kenyamanan lingkungan masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	%	100	100	100	100.00	100

Nilai Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan) diperoleh dari jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan per jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan. Berdasarkan data dari Satpol PP Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat penyelesaian pelanggaran K3} = \frac{6}{6} \times 100 = 100$$

Satpol PP Kabupaten Brebes dalam melakukan penanganan ancaman gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)

dalam kehidupan masyarakat dapat ditekan dan dikendalikan dengan adanya dengan optimalisasi pelaksanaan patroli wilayah serta meningkatkan penyuluhan maupun pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban di wilayah Kabupaten Brebes. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Patroli diantaranya :

1. Minimnya sarana dan prasarana
2. Masalah penjual yang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha
3. Kurangnya kesadaran masyarakat atas Pelanggaran Perda
4. Masih Kurangnya PPNS dilingkup Satpol PP
5. Alokasi anggaran masih minim

Berdasarkan data diatas, dengan melihat skala pengukuran tingkat capaian kinerja dapat kita ketahui bahwa kedua kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja baik Program Penegakkan Peraturan Daerah, Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama maupun Program Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pencegahan Bahaya Kebakaran dapat dikatakan dalam kategori **Baik (100%)**.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes masih terdapat beberapa kendala dan perlu mendapat perbaikan bersama, hal tersebut guna untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan anggota Satpol PP yang terlatih, sarana dan prasarana dalam setiap kegiatan operasional agar bisa maksimal tercapai;
2. Perlunya sistem pelaporan yang lengkap dan tepat dalam setiap kegiatan yang dilakukan;
3. Kegiatan yang disusun akan diarahkan untuk menunjang pencapaian program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Brebes;
4. Indikator masing-masing bidang yang masih berkualitas output, diupayakan untuk dirasionalisasi menjadi indikator outcome, sehingga ketercapaian target yang telah ditetapkan dapat diukur secara tepat.

MISI V : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menjadi Desa Yang Maju Dan Mandiri

Pada Misi Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri ini terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Dalam hal ini, Perangkat Daerah yang mengampu/ bertanggung jawab dalam Misi ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 3.32. Capaian Kinerja Misi Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menjadi Desa Yang Maju Dan Mandiri

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8
Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	%	100.00	68.49	68.49	100	100
Desa mampu menyusun APBDDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun APBDDes tepat waktu	%	100.00	68.49	68.49	100	100
Desa yang memiliki BUMDes	Rasio desa yang memiliki BUMDes	%	100.00	68.49	68.49	100	100
			100.00			100	

Nilai persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu per jumlah desa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu} = \frac{200}{292} \times 100 = 68,49$$

Nilai persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang menyusun APBDes tepat waktu per jumlah desa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu} = \frac{200}{292} \times 100 = 68,49$$

Nilai Rasio desa yang memiliki BUMDes diperoleh dari jumlah desa yang memiliki BUMDes per jumlah desa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu} = \frac{200}{292} \times 100 = 68,49$$

Hasil pencapaian dari pengukuran kinerja diatas prosentase rata – rata capaiannya 100 yang dikategorikan **sangat baik**. Capaian kinerja menunjukan bahwa target dari setiap program dan kegiatan dapat direalisasikan dengan baik, Pencapaian target dan indikator kinerja tidak terlepas dari dukungan semua program dan kegiatan serta peran masyarakat dalam pembangunan yang sangat tinggi.

Dari capaian indikator kinerja utama dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu.

Target Tahun 2021 Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu sebesar 68,49% dan realisasi 68,49% tercapai 100%. Hal ini berarti pada tahun 2021 Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu sebanyak 200 desa dari 292 desa. Dibandingkan tahun 2020 yang realisasinya mencapai 51,36% (149 desa) berarti ada peningkatan sebanyak 50 desa.

2. Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu.

Target Tahun 2021 Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu sebesar 68,49% dan realisasi 68,49% tercapai 100%. Hal ini berarti pada tahun 2021 Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu sebanyak 200 desa dari 292 desa. Dibandingkan tahun 2020 yang realisasinya mencapai 51,36% (149 desa) berarti ada peningkatan sebanyak 50 desa.

3. Desa memiliki BUMdes.

Target Tahun 2021 Desa memiliki BUMdes sebesar 68,49% dan realisasi 68,49% tercapai 100%. Hal ini berarti pada tahun 2021 Desa memiliki BUMdes sebanyak 200 desa dari 292 desa. Dibandingkan tahun 2020 yang realisasinya mencapai 51,36% (149 desa) berarti ada peningkatan sebanyak 50 desa.

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pada tahun anggaran 2021 yang memadai, selaras dengan perencanaan dan target di masing-masing kegiatan. Adapun permasalahan yang ada dalam pencapaian target kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Adanya prasarana di perdesaan yang kurang memadai, meskipun setiap desa memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan untuk mendukung pemberdayaan berbasis masyarakat.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan.
3. Usaha ekonomi produktif belum dapat berkembang sesuai harapan, hal ini dapat dilihat dari jumlah lembaga keuangan mikro yang tidak aktif dan tidak memberikan kontribusi dalam penyediaan atau memfasilitasi modal usaha.
4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk masyarakat miskin di perdesaan masih rendah, disebabkan masih minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sasaran tersebut.

MISI VI : Menciptakan Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Sasaran Strategis 6.1

Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

1. Harapan Lama Sekolah
2. Rata-rata Lama Sekolah
3. Usia Harapan Hidup
4. Pengeluaran per-Kapita yang disesuaikan (PPP)
5. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
6. Proporsi perempuan di lembaga pemerintah (ASN)
7. Persentase penanganan korban KDRT

Pada sasaran ini, indikator Harapan Lama Sekolah; Rata-rata Lama Sekolah; dan Usia Harapan Hidup telah dibahas pada Misi ke-I Sasaran strategis Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan Sasaran strategis Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 3.33. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Pengeluaran per-kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp	156.28	6,455	10,152	157.27	6,474
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	100.00	2.17	1.36	62.67	2.33

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan (ASN)	%	166.70	28.67	36.03	125.67	29.24
Persentase penanganan korban KDRT	%	100.00	100	100	100	100
Rata-rata		130.74			110.12	

Pengeluaran per-kapita yang disesuaikan (PPP) merupakan pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak sesuai dengan standar hidup layak, atau dapat diartikan Kemampuan masyarakat (perempuan) dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes capaian indikator sebesar 10,152 juta rupiah per tahun. Capaian indikator kinerja tercapai 157,27 % (sangat berhasil) capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun 2020 yang tercapai 156,28 %. Meredanya wabah Covid-19 telah memulihkan kondisi ekonomi dan berdampak pada meningkatnya sebagian besar pendapatan penduduk Kabupaten Brebes.

Nilai Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan diperoleh dari jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan per jumlah pekerja perempuan. Berdasarkan data dari DP3KB Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan} = \frac{4.321}{317.510} \times 100 = 1.36$$

Nilai Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan (ASN) diperoleh dari Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berdasarkan data dari

DP3KB Kabupaten Brebes capaian indikator kinerja tercapai 63,13 % (Rendah), capaian ini lebih rendah dari capaian 2020 yang tercapai 100 %.

Nilai proporsi perempuan di lembaga pemerintahan diperoleh dari jumlah perempuan di lembaga pemerintahan ASN per jumlah ASN. Berdasarkan data dari DP3KB Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{proporsi perempuan di lembaga pemerintahan} = \frac{4.502}{12.493} \times 100 = 36,03$$

Indikator kinerja proporsi perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses formal khususnya di lembaga pemerintahan. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan birokrasi dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Berdasarkan data dari DP3KB Kabupaten Brebes capaian indikator kinerja tercapai 125,67 % (Sangat tinggi), capaian ini lebih rendah dari capaian 2020 yang tercapai 166,70 %.

Nilai Persentase penanganan korban KDRT diperoleh dari jumlah penanganan kasus KDRT per jumlah kasus KDRT. Berdasarkan data dari DP3KB Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase penanganan korban KDRT} = \frac{77}{77} \times 100 = 100$$

Pemerintah memiliki upaya-upaya dalam penghapusan KDRT, salah satunya dengan mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. Pemerintah juga mempunyai upaya-upaya guna mencegah dan melindungi segala bentuk KDRT. Indikator persentase penanganan

korban KDRT menunjukkan capaian 100% (Sangat tinggi), capaian ini sama dengan capaian tahun 2020 yang tercapai 100%.

Rata – rata dari hasil pengukuran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan mencapai 110.12% yang dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Sasaran Strategis 6.2
Meningkatnya Jaminan Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Anak Secara Merata

Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara Merata memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Prevalensi anak bekerja
2. Rasio perkawinan anak
3. Cakupan anak memiliki akte
4. Persentase penanganan korban kekerasan pada anak

Tabel 3.34. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara Merata

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Prevelansi anak bekerja	%	200.00	0.0182	0	200	0.0182
Rasio perkawinan anak	%	196.67	0.42	2.95	-502.38	0.42
Cakupan anak memiliki akte	%	90.32	97	97.04	100.04	100
Persentase penanganan korban kekerasan pada anak	%	100.00	100	100	100	100
Rata-rata		146.75			-25.58	

Nilai prevelansi anak bekerja diperoleh dari jumlah pekerja usia anak per jumlah penduduk bekerja. Berdasarkan data dari DP3KB Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{prevelansi anak bekerja} = \frac{0}{793.289} \times 100 = 0$$

Indikator prevalensi anak bekerja didapatkan dari Jumlah pekerja usia anak per jumlah penduduk bekerja. Berdasarkan data dari DP3KB Kabupaten Brebes capaian indikator kinerja tercapai 200% (sangat berhasil), capaian ini sama dengan data capaian tahun 2020 yang tercapai 200%.

Nilai rasio perkawinan anak diperoleh dari jumlah kasus perkawinan anak per jumlah perkawinan. Berdasarkan data dari DP3KB Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio perkawinan anak} = \frac{494}{16.745} \times 100 = 2,95$$

Indikator rasio perkawinan anak didapatkan dari Jumlah kasus perkawinan anak per jumlah perkawinan, Berdasarkan informasi yang di dapatkan di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Brebes bahwa jumlah pernikahan di Kabupaten Brebes tahun 2021 yaitu 16.745 Orang, sejumlah 494 Anak mendapatkan dispensasi nikah dikarenakan adanya permasalahan terkait ekonomi, pendidikan dan ada yang terjadi kehamilan di luar pernikahan, sehingga capaian indikator kinerja tercapai -502,38 % (sangat tidak berhasil), capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2020 yang tercapai 196,67 %.

Nilai cakupan anak memiliki akte diperoleh dari Jumlah anak (usia 0-18 tahun) memiliki akte per jumlah anak. Berdasarkan data dari DIndukcapil Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cakupan anak memiliki akte} = \frac{542.520}{559.067} \times 100 = 97,04$$

Indikator Cakupan anak memiliki akte didapatkan dari Jumlah anak (usia 0-18 tahun) memiliki akte per jumlah anak. Salah satu inovasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes untuk pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan adalah Layanan Bangkit. Layanan Bangkit adalah Layanan terintegrasi 2 in 1, dimana bayi yang dilahirkan di fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, akan mendapatkan dua dokumen kependudukan sekaligus. Dokumen yang dimaksud adalah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Baru. Dengan layanan ini, penduduk tidak perlu mengurus Kartu Keluarga Baru terlebih dahulu di Unit Pelayanan Adminduk Kecamatan untuk mendapatkan Akta Kelahiran. Namun penduduk akan mendapatkan sekaligus keduanya dalam sekali pengurusan di fasilitas kesehatan dimana bayi dilahirkan. capaian indikator kinerja tercapai 100,04 % (sangat berhasil), capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 yang tercapai 90,32 %.

Nilai cakupan Persentase penanganan korban kekerasan pada anak diperoleh dari Jumlah penanganan korban kekerasan pada anak per jumlah kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan. Berdasarkan data dari DIndukcapil Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase penanganan korban kekerasan pada anak} = \frac{61}{61} \times 100 = 100$$

Indikator Persentase penanganan korban kekerasan pada anak didapatkan dari Jumlah penanganan korban kekerasan pada anak per jumlah kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan. Berdasarkan data dari DP3KB Kabupaten Brebes capaian indikator kinerja tercapai 100% (sangat berhasil), capaian ini sama dengan data capaian tahun 2020 yang tercapai 100%.

Rata – rata dari hasil pengukuran pada Sasaran Strategis Meningkatkan Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara Merata mencapai -25,58 % yang dikategorikan **Sangat Tidak Berhasil**.

Sasaran Strategis 6.3

Meningkatnya penanganan PMKS

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan penanganan PMKS memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial dan Persentase PMKS penerima KUBE.

Tabel 3.35. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara Merata

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2020	Target	Realisasi	Capaian Th. 2021	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial	%	166.67	70	100	142.86	80
Persentase PMKS penerima KUBE	%	100.00	7	1	14.29	8
Rata-rata		133,33			78.57	

Nilai persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial diperoleh dari Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial per jumlah PMKS. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial} = \frac{26.567}{26.567} \times 100 = 100$$

Nilai persentase PMKS penerima KUBE diperoleh dari Jumlah PMKS penerima KUBE per jumlah PMKS. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Brebes realisasi indikator tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{persentase PMKS penerima KUBE} = \frac{270}{26.567} \times 100 = 1$$

Rata – rata dari hasil pengukuran pada Sasaran Strategis Meningkatnya penanganan PMKS mencapai 78.57 yang dikategorikan **Tinggi**.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6.3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.36. Capaian Kinerja Sasaran 6.3

	INDIKATOR KINERJA		TARGET TH.2021	REALISASI TH. 2021	CAPAIAN TH. 2021	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial	1.	Cakupan Penanganan PMKS	97%	93%	96%	96%
	2.	Prosentase PMKS Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	59%	100%	169%	169%
	3.	Prosentase PMKS Mampu Menjalankan Fungsi Sosialnya	50,89%	40%	79%	79%

Indikator kinerja sasaran meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat meliputi 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja yang berbeda. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial dapat diukur dari 3 (dua) indikator yaitu Cakupan Penanganan PMKS, Prosentase PMKS Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasarnya, dan indikator ketiga adalah Prosentase PMKS Mampu Menjalankan Fungsi Sosialnya.

Capaian kinerja Indikator 1 (satu) pada Sasaran 1 pada tahun 2021 adalah sebesar 96%, atau tercapai sebesar 96%

terhadap target akhir Renstra. Indikator 2 (dua) pada Sasaran 1 yaitu Prosentase (%) PMKS Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasarnya capaian kinerjanya pada tahun 2021 adalah sebesar 169% atau sebesar 169%. Sedangkan capaian indikator 3 (tiga) pada Sasaran 1 yaitu Prosentase PMKS Mampu Menjalankan Fungsi Sosialnya pada tahun 2021 adalah sebesar 79%.

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Dinas Sosial Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Keberhasilan pencapaian sasaran 6.3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020 menunjukkan kenaikan. Berdasarkan realisasi pendapatan tahun 2021, secara umum pendapatan daerah dapat tercapai sebesar Rp 3.152.123.285.229,00 dari target sebesar Rp 3.138.485.176.291,00 atau telah melampaui target sebesar Rp. 206.498.062.268,00. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Brebes dari tahun 2012 – 2021 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.36. Perkembangan Pendapatan Daerah dari Tahun 2012 – 2021

TAHUN	PENDAPATAN		REALISASI
	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4
2012	1.570.670.462.000,00	1.567.078.034.277,00	99,77
2013	1.758.507.520.000,00	1.781.873.278.077,00	101,33
2014	1.957.064.095.000,00	2.045.064.030.908,00	104,50
2015	2.432.876.271.000,00	2.417.208.946.548,00	99,37
2016	2.785.284.383.000,00	2.572.334.594.631,00	92,35
2017	2.875.777.806.000,00	2.824.292.206.279,58	98,21
2018	2.889.816.641.000,00	2.854.028.069.566,31	98,76
2019	3.127.590.616.000,00	3.317.472.151.930,00	106,07
2020	3.004.837.514.000,00	3.008.370.717.507,00	100,12
2021	3.138.485.176.291,00	3.152.123.285.229,00	100,43

Sumber : BPKAD Kabupaten Brebes 2022

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pendapatan daerah secara umum adalah masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD dibanding dengan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Hal ini berakibat pada kondisi daerah dengan ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat yang masih cukup tinggi.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021 adalah:

- Melakukan pendataan dan putahiran data sumber-sumber PAD.
- Melakukan penetapan target pendapatan yang sesuai dengan potensinya.
- Mengembangkan dan menggali sumber-sumber PAD.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem administrasi pendapatan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan daerah dapat terkumpul secara optimal dan tidak terjadi kebocoran.

- e. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya.
- f. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan.
- g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- h. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah.
- i. Meningkatkan pola koordinasi internal dan pola koordinasi eksternal dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
- j. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung meningkatnya PAD.
- k. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk anggaran belanja daerah Kabupaten Brebes pada APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 3.286.307.643.838,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.118.236.158.159,00 atau sebesar 94,89%.

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2021 adalah berikut:

Tabel 3.37. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	PENDAPATAN DAERAH	3,138,485,176,291	3,152,123,285,229	206,498,062,268	100.43%
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	481,422,097,000	508,831,749,562	27,409,652,562	105.69%
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	120,020,000,000	124,436,275,358	4,416,275,358	103.68%
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	33,644,220,000	15,280,857,742	(18,363,362,258)	45.42%
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,882,962,000	9,839,332,523	(43,629,477)	99.56%
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	317,874,915,000	359,275,283,939	41,400,368,939	113.02%
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	2,464,203,125,961	2,456,125,711,667	(8,077,414,294)	99.67%
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,242,175,594,856	2,238,340,473,031	(3,835,121,825)	99.83%
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	1,726,405,350,856	1,722,570,229,031	(3,835,121,825)	99.78%
4 . 2 . 1 . 2	Dana Insentif Daerah (DID)	23,291,740,000	23,291,740,000	-	100.00%
4 . 2 . 1 . 5	Dana Desa	492,478,504,000	492,478,504,000	-	100.00%
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	222,027,531,105	217,785,238,636	(4,242,292,469)	98.09%
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	209,684,531,105	206,205,264,636	(3,479,266,469)	98.34%
4 . 2 . 2 . 2	Bantuan Keuangan	12,343,000,000	11,579,974,000	(763,026,000)	93.82%
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	192,859,953,330	187,165,824,000	187,165,824,000	97.05%
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	12,500,000,000	8,175,000,000	8,175,000,000	65.40%
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	180,359,953,330	178,990,824,000	178,990,824,000	99.24%

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	BELANJA DAERAH	3,286,307,643,838	3,118,236,158,159	168,071,485,679	94.89%
5 . 1	BELANJA OPERASI	2,086,950,229,960	1,984,718,634,139	102,231,595,821	95.10%
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1,083,054,366,150	1,059,997,716,454	23,056,649,696	97.87%
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	886,671,048,628	813,034,548,865	73,636,499,763	91.70%
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	274,000,000	273,265,200	734,800	99.73%
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	98,218,313,682	93,365,302,620	4,853,011,062	95.06%
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	18,732,501,500	18,047,801,000	684,700,500	96.34%
5 . 2	BELANJA MODAL	493,807,389,839	438,873,238,588	54,934,151,251	88.88%
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	1,748,750,000	1,505,476,140	243,273,860	86.09%
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107,447,912,678	81,282,197,355	26,165,715,323	75.65%
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181,100,658,297	159,174,560,006	21,926,098,291	87.89%
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	186,909,062,622	180,910,365,758	5,998,696,864	96.79%
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16,601,006,242	16,000,639,329	600,366,913	96.38%
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7,582,672,151	2,735,627,990	4,847,044,161	36.08%
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	7,582,672,151	2,735,627,990	4,847,044,161	36.08%
5 . 4	BELANJA TRANSFER	697,967,351,888	691,908,657,442	6,058,694,446	99.13%
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	17,701,635,388	12,244,943,942	5,456,691,446	69.17%
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	680,265,716,500	679,663,713,500	602,003,000	99.91%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(147,822,467,547)	33,887,127,070	38,426,576,589	-22.92%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	181,492,467,547	181,498,742,703	6,275,156	100.00%
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	181,482,467,547	181,482,467,547	(0)	100.00%

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10,000,000	16,275,156	6,275,156	162.75%
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33,670,000,000	31,663,260,000	2,006,740,000	94.04%
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	20,000,000,000	18,000,000,000	2,000,000,000	90.00%
6 . 2 . 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13,670,000,000	13,663,260,000	6,740,000	99.95%
	PEMBIAYAAN NETTO	147,822,467,547	149,835,482,703	149,835,482,703	101.36%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	183,722,609,772	188,262,059,291	0%

Sumber : BPPKAD Kab.Brebes (un-audit)

Secara umum pelaksanaan belanja daerah pada tahun 2021 sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Jika dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2021 belanja dapat direalisasikan sebesar 94,89%. Belum optimalnya realisasi tersebut karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tahun 2021 karena proses pelaksanaannya dengan pola multiyears. Dipengaruhi pula adanya efisiensi belanja.

Memperhatikan hal tersebut, maka solusi/ pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah perencanaan program dan kegiatan yang lebih akurat, dan peningkatan kesiapan OPD dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan setelah APBD ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Brebes tahun 2021 yang merupakan tahun ke-4 pada RPJMD 2017-2022 dalam pembangunan periode lima tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap capaian kinerja pada semua sasaran pembangunan daerah, dengan cara membandingkan capaian setiap indikator kinerja sasaran terhadap target yang telah ditentukan, menunjukkan capaian kinerja pada kategori **Sangat Baik/ Sangat Berhasil**, dengan rata-rata 323,93%. Apabila dirinci atas capaian kinerja pada 27 sasaran strategis dan 45 indikator pembangunan yang ada, capaian kinerja berkategori sangat berhasil sebanyak 32 indikator, berkategori berhasil sebanyak 4 indikator, berkategori cukup berhasil sebanyak 1 indikator, berkategori kurang berhasil 2 indikator, dan berkategori sangat kurang berhasil 4 indikator dan masih dalam proses hasil penilaian sebanyak 2 indikator.

Hasil capaian kinerja ini tentulah tidak terlepas dari komitmen kepala Perangkat Daerah untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam IKU dan Renstra.

Adanya capaian kinerja sasaran yang belum mencapai 100 (mencapai target) pada tahun 2021 ini menunjukkan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target sasaran secara optimal. Beberapa permasalahan yang telah ditemukan dalam usaha pencapaian target serta solusi pemecahan yang telah dirumuskan, perlu disadari oleh pelaksana kegiatan serta semua stakeholder untuk menjadi masukan dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang sehingga tingkat capaian kinerja pada setiap sasaran pembangunan daerah dapat ditingkatkan, antara lain :

- 1) Perlu adanya system monitoring, evaluasi dan pengendalian capaian kinerja pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja yang lebih baik;
- (2) Diperlukan adanya upaya yang keras dalam peningkatan IPM di Kabupaten Brebes dengan sinergitas Perangkat Daerah yang terkait;
- (3) Perlu adanya peningkatan kualitas SDM dan Sistem Pelayanan Publik di berbagai bidang.

Dari segi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Brebes, pada awal tahun 2021 pendapatan sebesar Rp. 3.152.123.285.229,00 dan sampai dengan akhir tahun 2021 telah dibelanjakan sebesar Rp. 3.118.236.158.159,00 (98,92%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 33.887.127.070,00 (1,08%).

Di era demokrasi, transparansi dan globalisasi saat ini, diperlukan komitmen dan upaya kita bersama untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Salah satu upaya adalah dengan terus meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, dari tahun ke tahun perlu senantiasa disempurnakan sehingga LKjIP dapat memberikan informasi capaian kinerja pembangunan daerah setiap tahunnya kepada masyarakat dan pihak-pihak lainnya secara transparan dan akuntabel.

Brebes, 22 Maret 2022


BUPATI BREBES,
IDZA PRIYANTI, SE, MH.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IDZA PRIYANTI, SE., MH

Jabatan : BUPATI BREBES

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Brebes, Februari 2021

BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI, SE., MH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,25
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,15
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat		68,46
		Usia Harapan Hidup (tahun)	
2	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik bagi Masyarakat	Rasio jalan baik (%)	81
	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	Cakupan akses air minum layak (%)	89,95
	Meningkatnya cakupan sanitasi	Cakupan akses jamban (%)	74,25
		Persentasi kawasan bebas banjir perkotaan (%)	98
		Persentase Penanganan Persampahan (%)	28,66
		Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik	Rasio jaringan irigasi baik (%)
	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni (%)	87,41
	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Persentase permukiman kumuh (%)	18,64
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :	
		- Indek Kualitas Air	47,6
		- Indeks Kualitas Udara	84,4
		- Indek Kualitas Tutupan Lahan	68,5
4	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian (juta rupiah)	21.219.108.000
	Meningkatnya Kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan (juta rupiah)	6.198.153.000
	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan (juta rupiah)	6.271.182.000
	Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata (juta rupiah)	2.592.318.000
	Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan	Laju kenaikan investasi (%)	2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	ketersediaan sumberdaya alam, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA / PMDN) (milyar rupiah)	1.384.000.000.000
	Meningkatnya penguatan system inovasi daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan (%)	80
	Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,73
		Rasio penduduk yang bekerja (%)	66,15
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM	79,39
	Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Indeks nilai hasil evaluasi LPPD	Tinggi
		Opini BPK	WTP
	Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	Indeks Profesionalitas ASN	63,45
	Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah (%)	80
6	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan serta kenyamanan lingkungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) (%)	100
7	Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)	68,49
	Desa mampu menyusun APBDDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun APBDDes tepat waktu (%)	68,49
	Desa yang memiliki BUMDes	Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)	68,49
8	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	Harapan Lama sekolah (tahun)	11,82
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	4,96
		Angka Harapan Hidup (tahun)	71,04
		Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) (ribu rupiah)	6.455

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	2,17
		Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)	28,67
		Persentase penanganan korban KDRT (%)	100
		Prevalensi anak bekerja (%)	0.0182
		Rasio perkawinan anak (%)	0,42
		Cakupan anak memiliki akte (%)	97,00
		Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)	100
10	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)	70
		Persentase PMKS penerima KUBE (%)	7

Brebes, Februari 2021

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI, SE, MH

Perjanjian Kinerja 2021

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	20,642,000,000	
2	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	20,642,000,000	
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30,618,000,000	
4	Program Kesehatan Masyarakat	49,833,000,000	
5	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2,444,000,000	
6	Program Pelayanan Kesehatan	11,900,000,000	
7	Program Sumber Daya Kesehatan	25,249,000,000	
8	Program Pembangunan / Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan	254,500,000,000	
9	Program Pembangunan, Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan	2,450,000,000	
10.	Program Pengembangan Pengelolaan Sampah, Limbah bahan berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran	46,533,000,000	
11.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Air Baku dan Jaringan Pengairan lainnya	30,155,000,000	
12.	Program Perumahan Rakyat	17,680,000,000	

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
13.	Program Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9,450,000,000	
14.	Program Perencanaan dan Pemaatan Hukum Lingkungan	11,350 ,000,000	
15.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan	340,000,000	
16.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2,255,000,000	
17	Program Peningkatan Produksi Holtikultura dan Perkebunan	4,505,000,000	
18.	Program Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Prasarana dan Sarana Pertanian	7,540,000,000	
19.	Program Peningkatan Kapasitas teknologi dan sistem produksi industri logam, sandang dan aneka	565,000,000	
20.	Program Peningkatan Kapasitas Teknologi dan Sistem Produksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan	955,570,000	
21.	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	749,000,000	
22.	Program Pengembangan, Kemitraan Pemberdayaan, dan Promosi Usaha Mikro	537,000,000	
23.	Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Perdagangan dalam Negeri	9,185,000,000	
24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kepariwisata	6,450,000,000	
25.	Program Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	1,290,000,000	
26.	Program Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	1,135,000,000	

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
27.	Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	200,000,000	
28.	Program Penyelenggaraan Informasi, Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	611,750,000	
29.	Program Penelitian dan Pengembangan	1,153,000,000	
30.	Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	4,341,000,000	
31.	Program Kelembagaan OPD dan Kinerja Aparatur	2,015 ,000,000	
32.	Program Tata Pemerintahan	4,100,000,000	
33.	Program Aset Daerah	2,830,000,000	
34.	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	3,821,000,000	
35.	Program Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian	1,695,000,000	
36.	Program Pengelolaan Mutasi Kepegawaian	1,351,000,000	
37.	Program Penegakan Peraturan Daerah, Pemeliharaan Ketertiban	2,965,000,000	
38.	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	2,120,000,000	
39.	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipatif Masyarakat	4,314,000,000	
40.	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1,217,000,000	
41.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,305,000,000	

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
42.	Program Pelayanan Catatan Sipil	650,000,000	
43.	Program Peningkatan Pelaksanaan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	862,045,075,000	
44.	Program Pelayanan Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	3,224,524,765,000	

Brebes, Februari 2021

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI, SE, MH